WARTA PEMERIKSA

EDISI 7 ■ VOL. V ■ JULI 2022





PEMERINTAH BERUPAYA MENINGKATKAN BELANJA PRODUK DALAM NEGERI



Strategi Pemeriksaan

B

adan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan terkait dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) produk-produk yang beredar di Tanah Air. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap Kementerian Perindustrian dan instansi terkait lainnya.

Hasilnya, pemeriksaan atas Pengelolaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Belanja Pemerintah Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021 mengungkapkan sebanyak tujuh temuan pemeriksaan serta rekomendasi. Apa saja temuan dan rekomendasi BPK terkait dengan hal ini?

Tema ini yang redaksi kemukakan di *Warta Pemeriksa* edisi Juli 2022. Isu ini diangkat mengingat penggunaan produk dalam negeri terus didorong oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan nilai tambah dan mewujudkan kemandirian sektor industri.

Seperti disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah meminta jajarannya untuk menggunakan anggaran belanja terhadap produk dalam negeri.

Isu lain yang redaksi angkat yaitu mengenai sejumlah hal yang masih menghambat penerbitan izin berusaha melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Salah satunya adalah belum selarasnya peraturan perizinan di tingkat pusat dan daerah.

Padahal, perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi di sektor riil, serta industrialisasi. Upaya tersebut dilakukan melalui perbaikan peringkat kemudahan berusaha dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yaitu OSS RBA.

Edisi kali ini juga kami masih memberikan informasi mengenai SAI20. Agenda ini diyakini akan menjadi suatu *legacy* bagi Indonesia dan BPK Indonesia. Khususnya dalam mewujudkan peran serta SAI dalam mengatasi berbagai tantangan global untuk pulih dari krisis akibat pandemi Covid-19 dan upaya mempercepat pencapaian target SDGs. Di edisi kali ini, redaksi menyiapkan informasi mengenai bagaimana perjalanan SAI20 dari awal hingga menjelang SAI20 Summit di Bali.

Simak juga informasi mengenai Ahmad Adib Susilo yang kini menjabat sebagai Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) III. Pembaca bisa melihat bagaimana kisah perjalanannya di BPK dan seperti apa dia memandang sikap profesionalisme. Selamat menikmati. •

TIM EDITORIAL

Pengarah

Isma Yatun Agus Joko Pramono Bahtiar Arif

Penanggung Jawab

Selvia Vivi Devianti

Ketua Tim Redaksi

Selvia Vivi Devianti

Kepala Sekretariat

Bestantia Indraswati

Sekretariat

Bambang Supriedi Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqi Sutriono Klara Ransingin Ridha Sukma Sigit Rais Frenny Artiningrum S Apriyana Sudarman

Alamat Sekretariat

Gedung BPK-RI Jalan Gatot Subroto no 31 Jakarta Telepon: 021-25549000 Pesawat 1188/1187 Email: wartapemeriksa@bpk.go.id

www.bpk.go.id

Diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/ barang/fasilitas lainnya dari pihak yang terkait dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)

- 4 MENGAWAL PROGRAM PENGGUNAAN KOMPONEN DALAM NEGERI
- 8 PEMERINTAH BERUPAYA MENINGKATKAN BELANJA PRODUK DALAM NEGERI
- 10 TUMPANG TINDIH PERATURAN HAMBAT PENERBITAN IZIN BERUSAHA OSS
- 14 PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH BELUM TERARAH
- 17 PEMENUHAN KEBUTUHAN GURU MADRASAH BELUM MERATA
- 19 PENGELOLAAN PNBP DI KKP PERLU DIPERKUAT
- 20 MENJAGA PENGELOLAAN PENDAPATAN BLU KEMENHUB
- 21 MENCEGAH RISIKO KESEHATAN MASYARAKAT DARI HASIL PERIKANAN BUDI DAYA
- 24 MEMAHAMI MAKNA SERTA FUNGSI ISSAI 200 DAN ISSAI 2000



28 DARI TECHNICAL MEETING MENUJU SUMMIT SAI20

Supreme Audit Institution 20 (SAI20) akan menjadi suatu *legacy* bagi Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Khususnya dalam mewujudkan peran serta SAI dalam mengatasi berbagai tantangan global untuk pulih dari krisis akibat pandemi Covid-19 dan upaya mempercepat pencapaian target SDGs.

- 33 BPK BAHAS TRANSPORTASI BERKELANJUTAN BERSAMA SAO THAILAND DAN NAO CINA
- 34 KETUA BPK PAPARKAN HASIL PEMERIKSAAN DI PERTEMUAN IMO COUNCIL

- 35 BPK BUKA PELUANG KERJA SAMA BILATERAL DENGAN UK NAO
- 36 KETUA BPK SAMPAIKAN 3 POIN PENTING DI UN HLPF SIDE EVENT DI NEW YORK
- 38 AHMAD ADIB SUSILO, AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA III BPK 'JUNJUNG PROFESIONALISME DALAM BERKIPRAH DI BPK'
- 43 MUHAMMAD YUSUF ATEH, KEPALA BPKP 'MENGAWAL BELANJA PRODUK DALAM NEGERI'
- 47 MENGELOLA MUTASI PEGAWAI KEMENKEU
- 50 CERITA SUKSES TELKOM MENERAPKAN POLA KERJA FLEKSIBEL
- 52 HARMONI SENJA, AJANG MUSIK PEMERSATU INSAN BPK NTB
- 54 KLINIK PRATAMA BPK NTT JADI UJUNG TOMBAK KESEHATAN SELAMA PANDEMI



BPK PERTAJAM STRATEGI PEMERIKSAAN

Ketua BPK berpesan agar penyusunan rencana kegiatan dan anggaran mempertimbangkan isu-isu teraktual.

- 60 HATI-HATI! ASN HARUS PATUHI NETIKET DAN ATURAN BERMEDSOS
- 64 BERITA FOTO

MENGAWAL PROGRAM PENGGUNAAN KOMPONEN DALAM NEGERI

Pemeriksaan yang dilakukan pada Kementerian Perindustrian dan instansi terkait lainnya, mengungkapkan sebanyak tujuh temuan pemeriksaan beserta rekomendasi.

enggunaan produk dalam negeri terus didorong oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan nilai tambah dan mewujudkan kemandirian sektor industri. Pada 2020, target Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 telah tercapai. Namun, belum sesuai dengan target yang dipasang Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam Renstra 2020-2024.

Target yang ditetapkan Kemenperin lebih tinggi dibandingkan dengan yang dicantumkan dalam RPJMN. Dalam RPJMN 2020-2024, pencapaian TKDN pada 2020 ditargetkan sebesar 43,3 persen dan 2024 sebesar 50 persen. Adapun Renstra Kemenperin 2020-2024 menetapkan TKDN pada 2020 sebesar 49 persen dan 53 persen pada 2024.

Untuk mengawal upaya pemerintah tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Pengelolaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam Belanja Pemerintah Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021. Pemeriksaan yang dilakukan pada Kementerian Perindustrian dan instansi terkait lainnya, mengungkapkan sebanyak tujuh temuan pemeriksaan beserta rekomendasi.

P3DN merupakan suatu kebijakan pemberdayaan industri yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha, dan masyarakat serta memberdayakan industri dalam negeri melalui pengamanan pasar domestik, mengurangi ketergantungan kepada produk impor, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, dan memperkuat struktur industri. Mengacu pada RPJMN 2020–2024, Kemenperin sebagai pengguna produk dalam negeri dan pembina industri telah menetapkan target capaian nilai TKDN yang tertuang dalam Renstra 2020–2024 pada Sasaran Strategis Ketiga (SS3), yaitu "Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri".

Target nilai TKDN tersebut salah satunya merupakan hasil pelaksanaan fungsi pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal pembina industri. Selain itu, fungsi sertifikasi TKDN dilaksanakan oleh Pusat P3DN yang dibantu oleh lembaga verifikasi independen.

"Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian Tahun 2020 menunjukkan capaian nilai TKDN masih di bawah target Renstra 2020-2024, antara lain pada indikator TKDN (rerata tertimbang) dan persentase capaian penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan nilai masing-masing sebesar 43,68 persen dan 30 persen," demikian disampaikan BPK dalam LHP Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Belanja Pemerintah Tahun 2020-Semester I 2021.

Direktorat Jenderal Pembina Industri pada Kementerian Perindustrian mempunyai tugas diantaranya adalah melakukan pembinaan penggunaan produk dalam negeri. Untuk melakukan pembinaan tersebut, diperlukan penyusunan rencana pengembangan peningkatan nilai TKDN (roadmap TKDN) atas produk prioritas yang akan dikembangkan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam implementasi penggunaan produk dalam negeri terkait tidak adanya roadmap TKDN. Beberapa kelemahan yang ditemukan BPK terkait hal tersebut, antara lain, belum seluruh K/L/badan usaha menetapkan target capaian TKDN.

Seperti diketahui, RPJMN Tahun 2020-2024 menetapkan dua program prioritas terkait TKDN yaitu Pengembangan Industri Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan instansi pelaksana Kementerian ESDM dengan indikasi target 40 persen-70 persen untuk pembangunan Pembangkit Listrik EBT dan Penguatan Kebijakan Perlindungan Akses Dalam Negeri untuk sembi-



kateryna babaieva-pexels

lan sektor industri dengan TKDN rata-rata tertimbang 40,8 persen.

Hasil reviu dokumen dan wawancara dengan Pusat P3DN menunjukkan bahwa belum seluruh kementerian dan lembaga menetapkan target TKDN dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sampai dengan semester I tahun 2021, baru terdapat dua kementerian yang telah menetapkan dan berupaya melakukan peningkatan penggunaan PDN.

Salah satu kementerian tersebut adalah Kementerian ESDM. Peningkatan TKDN oleh Kementerian ESDM dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Renstra Kementerian ESDM Tahun 2020 –2024 juga telah menetapkan target capaian persentase TKDN pada Sasaran Strategis kedua "Optimalisasi Ketersediaan Pasokan Mineral".

Kementerian lainnya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang dituangkan dalam Surat Menteri PUPR Nomor PB.01.01-Mn/2775 tanggal 30 Desember 2020. Surat tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kementerian PUPR harus menggunakan material/bahan produk dalam negeri atau yang diproduksi di dalam negeri. Namun dalam surat tersebut tidak ditetapkan target capaian nilai TKDN.

Permasalahan lain yang ditemukan BPK terkait TKDN adalah masih rendahnya nilai transaksi produk bersertifikat TKDN K/L pada e-purchasing. Hasil verifikasi TKDN atas barang/jasa yang diberikan tanda sah capaian TKDN dengan masa berlaku 3 tahun dicantumkan dalam Daftar Inventarisasi Barang (DIB) Barang/Jasa produksi dalam negeri yang dimuat dalam situs http:tkdn.kemenperin.go.id. Atas barang yang sudah diberikan nilai TKDN tersebut diintegrasikan dengan data e-katalog LKPP.

Hasil pemeriksaan Tanda Sah Capaian TKDN pada DIB yang diambil dari website http:tkdn. kemenperin.go.id per 27 Oktober 2021 menunjukkan bahwa dari 23.014 produk yang bersertifikat, terdapat 1.888 produk dengan Tanda Sah Capaian TKDN yang sudah tidak berlaku. "Hasil penelusuran lebih lanjut menunjukkan bahwa dari 1.888 produk, telah dilakukan perpanjangan sebanyak 306 produk dan 1.582 lainnya, belum dapat diidentifikasi apakah telah diperpanjang," demikian ditulis BPK dalam LHP.

Menurut pemeriksaan BPK, realisasi TKDN pada BUMN juga masih rendah. BUMN merupakan salah satu instansi yang diminta turut berperan aktif dalam optimalisasi penggunaan produk dalam negeri. Peran aktif tersebut diukur melalui TKDN dalam setiap proyek yang dimiliki dan dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah.

Hasil analisis awal terhadap dokumen yang diperoleh dari Pusat P3DN terkait capaian TKDN pada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) menunjukkan, masih terdapat proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan capaian nilai TKDN di bawah ketentuan nilai minimal TKDN yang ditetapkan dalam Permenperin Nomor 54/M-IND/ PER/3/2012. Beberapa diantaranya memiliki deviasi sampai dengan 43 persen, antara lain pada pembangunan infrastruktur pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan gardu induk.

Atas permasalahan ketidaktercapaian TKDN dalam pembangunan insfrastuktur pembangkit ketenagalistrikan pada PT PLN (Persero) tersebut, BPK telah meminta data atas implementasi capaian TKDN pada BUMN kepada Kementerian BUMN. Melalui Surat BPK Nomor S-673/S.MBU/10/2021 perihal Penyampaian Laporan Realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri BUMN Periode 2020 - Semester I Tahun 2021, Sekretaris Kementerian BUMN menyatakan bahwa BUMN telah melakukan perhitungan TKDN secara mandiri atas proyek-proyek dan menyampaikan hasil perhitungan tersebut kepada BPK.

Persentase realisasi TKDN pada Tahun 2020 dan Semester I Tahun 2021 masing-masing sebesar 31,63 persen dan 56,01 persen. Selain itu, terdapat dua perusahaan dengan nilai realisasi TKDN di bawah 25 persen pada 2020.

Temuan lain BPK terkait pemeriksaan P3DN adalah pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan penggunaan produk dalam negeri belum sepenuhnya dilaksanakan dan dilaporkan.

Kegiatan pengawasan dan evaluasi dilaksanakan untuk mengukur tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, pengawasan terhadap pelaksanaan P3DN dilakukan oleh APIP serta pejabat pengawas internal dan Tim P3DN. Tujuannya untuk mengetahui pemenuhan dan kepatuhan terhadap pelaksanaan P3DN termasuk konsistensi komitmen K/L, BUMN/D dan Pemerintah

Daerah dan/atau produsen barang dan/atau penyedia Jasa dalam P3DN.

Meskipun kegiatan pengawasan dan evaluasi telah dilakukan, namun terhadap kegiatan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan P3DN masih menunjukkan permasalahan.

Pokja Pemantauan diketahui memiliki sejumlah tugas. Salah satu tugas itu adalah menerima dan mengidentifikasi rencana pengadaan barang/jasa dari Tim P3DN. Kemudian, menyelaraskan rencana pengadaan dengan ketersediaan produk dalam negeri sesuai daftar inventarisasi produk dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Adapun contoh tugas lainnya adalah memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kewajiban penggunaan produk dalam negeri.



Dalam RPJMN 2020-2024, pencapaian TKDN pada 2020 ditargetkan sebesar 43,3 persen dan 2024 sebesar 50 persen. Adapun Renstra Kemenperin 2020-2024 menetapkan TKDN pada 2020 sebesar 49 persen dan 53 persen pada 2024.

Hasil analisis atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh Pokja Pemantauan P3DN dan Pusat P3DN sebagai Sekretariat Timnas P3DN, berdasarkan dokumen dan keterangan Koordinator Tata Kelola dan Sertifikasi pada Pusat P3DN, menunjukkan, Pusat P3DN belum melakukan pembinaan kepada produsen barang dan/atau penyedia jasa untuk mampu memenuhi rencana kebutuhan penggunaan produk dalam negeri.

Selain itu, Tim Pokja Pemantauan belum melakukan pemantauan seluruh nilai transaksi produk bersertifikat TKDN dalam pengadaan barang jasa pemerintah, dan pengawasan terkait pencantuman besaran nilai TKDN pada label produk yang sudah ditandasahkan dengan sertifikat TKDN belum dilaksanakan.

Sejumlah Temuan dan Rekomendasi BPK dalam Pemeriksaan P3DN

Akibat

Permasalahan

Tidak ada ukuran

Rekomendasi BPK

Upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) belum didukung dengan rencana pengembangan peningkatan nilai TKDN (roadmap) dan penetapan produk prioritas yang akan dikembangkan antara lain, belum seluruh K/L/badan usaha menetapkan target capaian TKDN, nilai transaksi produk bersertifikat TKDN K/L pada E-Purchasing masih rendah, dan realisasi TKDN pada BUMN masih rendah.

dan pedoman yang jelas terkait dengan pemberdayaan industri dan penguatan struktur industri dalam pelaksanaan P3DN.



Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional P3DN menginstruksikan para Direktur Jenderal pembina industri berkoordinasi dengan K/L terkait untuk menyusun roadmap TKDN dan menetapkan produk prioritas yang akan dikembangkan.

Pelaksanaan sertifikasi TKDN belum didukung dengan standar dan prosedur yang memadai untuk panduan produsen dan surveyor pelaksana verifikasi capaian TKDN.

Belum adanya keselarasan ketentuan serta standarisasi dokumen pendukung sehingga tidak dapat diketahui kedalaman struktur industri dalam penghitungan TKDN atas produk yang disertifikasi TKDN.

Menteri Perindustrian memerintahkan Kepala Pusat P3DN menyusun standar dan prosedur terkait dengan tata cara penghitungan overhead pabrik dan jenis dokumen yang digunakan dalam penghitungan TKDN untuk menjadi acuan surveyor pelaksanaan verifikasi capaian TKDN.

Pengawasan dan evaluasi atas P3DN belum sepenuhnya dilaksanakan dan dilaporkan.



Ketua Harian Tim Nasional P3DN, Pusat P3DN, Direktur Jenderal, Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT), dan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian tidak dapat mengidentifikasi kelemahan dalam P3DN sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan perbaikan P3DN.

Menteri Perindustrian selaku Ketua Harian Tim Nasional P3DN memerintahkan Ketua Pokja Pemantauan menyusun mekanisme prosedur dan tata cara pengawasan terkait dengan implementasi P3DN.

Sumber: IHPS II 2021



Isu tersebut menjadi bagian dari objek pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

residen Joko Widodo meminta jajarannya untuk menggunakan anggaran belanja terhadap produk dalam negeri. Belanja pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah harus mampu menciptakan nilai tambah pada negara dan membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 pada Juni lalu.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, arahan Presiden tersebut kini semakin dipertegas. "Dulu Presiden menyampaikan belanja prioritas produk dalam negeri. Sekarang, perintahnya lebih tegas yakni dilarang impor," ungkap Basuki kepada Warta Pemeriksa.

Basuki menjelaskan, pihaknya sudah menerbitkan peraturan menteri (permen) untuk memprioritaskan belanja produk dalam negeri sejak dua tahun lalu. Selain itu, Basuki juga menjadikan isu tersebut sebagai bagian dari objek pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.



Dulu Presiden menyampaikan belanja prioritas produk dalam negeri. Sekarang, perintahnya lebih tegas yakni dilarang impor.

"Alhamdulillah mungkin saat ini sudah sekitar 90 persen, jadi hampir semuanya sudah menggunakan produk dalam negeri," ujarnya.

Basuki menegaskan, belanja produk dalam negeri harus diprioritaskan meski secara kualitas tidak sekuat produk impor. Dia mencontohkan, apabila terdapat produk impor dengan daya tahan 20 tahun dibandingkan produk dalam negeri dengan daya tahan 10 tahun maka harus tetap memprioritaskan produk dalam negeri.

"Karena kalau kita tidak membelinya mereka tidak akan berkembang," ujar Basuki.

Saat ini, Kementerian PUPR sudah menjalin kerja sama dengan berbagai produsen lokal untuk memproduksi atau membuat barang substitusi impor. Contohnya, kata Basuki, adalah produk ekskavator yang kini dikerjasamakan dengan perusahaan pelat merah PT Pindad.

"Ini supaya ada produk dalam negeri," kata Basuki.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan hal serupa. Dia menyebut, peraturan menteri pertanian (permentan) terkait belanja produk dalam negeri juga sudah diterbitkan. Bahkan, menurut Mentan, hampir seluruh pimpinan kementerian/lembaga sudah menunjukkan komitmen untuk mendukung belanja produk dalam negeri.

"Saya kira semua menteri (sudah menerbitkan aturan)," ujarnya.

Syahrul menyampaikan, arahan untuk mendukung belanja produk dalam negeri sudah bukan menjadi prioritas melainkan sebuah keharusan. Sehingga, ujarnya, diharapkan kualitas produk dalam negeri bisa semakin meningkat ke depannya.

Belanja negara diharapkan bisa semakin efisien dan memberikan nilai tambah kepada perekonomian. Dengan membelanjakan produk-produk dalam negeri, maka juga akan meningkatkan lapangan kerja yang dibutuhkan masyarakat saat ini. •



TUMPANG TINDIH PERATURAN HAMBAT PENERBITAN IZIN BERUSAHA OSS

Perizinan persyaratan dasar yang merupakan kewenangan beberapa K/L juga belum sepenuhnya dapat diintegrasikan ke dalam sistem OSS RBA.

> erbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, investasi di sektor riil, serta industrialisasi. Upaya tersebut dilakukan melalui perbaikan peringkat kemudahan berusaha dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yaitu Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada sejumlah hal yang masih menghambat penerbitan izin berusaha melalui OSS RBA, salah satunya adalah belum selarasnya peraturan perizinan di tingkat pusat dan

> Seperti disampaikan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2021, pemeriksaan kinerja terkait dengan upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi, dilakukan pada dua kementerian/lembaga (K/L), yaitu Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemeriksaan juga dilakukan pada 41 pemerintah daerah (pemda), yang meliputi satu pemerintah provinsi (Pemprov), 21 pemerintah kabupaten (pemkab), dan 19 pemerintah kota (pemkot).

Ada beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi. BKPM, misalnya, sudah menetapkan peraturan pelaksanaan perizinan berusaha



dan melakukan sosialisasi peraturan-peraturan tersebut kepada K/L, pemda, dan masyarakat. Selain itu, BKPM mengembangkan sistem OSS RBA dan meluncurkannya secara resmi pada 9 Agustus 2021 sebagai salah satu bentuk reformasi perizinan berusaha di Indonesia.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan, peraturan perizinan berusaha pada tingkat pusat dan daerah belum sepenuhnya selaras dan lengkap untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. "Akibatnya perizinan berusaha pada seluruh sektor yang memerlukan persyaratan dasar perizinan berusaha belum dapat diterbitkan melalui sistem OSS RBA," demikian disampaikan BPK dalam IHPS II 2021.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Peningkatan Daya Saing dan Penanaman Modal Tahun 2021-2022 yang dilakukan pada BKPM dan instansi terkait lainnya, ada ketidakharmonisan antara Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan



Hasil pemeriksaan BPK menemukan bahwa pemda belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi dalam pelayanan perizinan.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketidakharmonisan tersebut berkaitan dengan persyaratan dasar penerbitan perizinan berusaha.

PP Nomor 5 Tahun 2021 pada Pasal 4 menetapkan untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha berbasis risiko. Persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Salah satu persyaratan dasar penerbitan perizinan berusaha sesuai ketentuan

Pasal 5 PP Nomor 5 Tahun 2021 adalah persetujuan lingkungan. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis Persetujuan Lingkungan ditetapkan dalam PP Nomor 22 Tahun 2021.

Persetujuan Lingkungan diterbitkan melalui pengujian kelayakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), pemeriksaan formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), atau penerbitan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Dalam sistem OSS, pengujian dokumen Amdal dilakukan untuk penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH). Sedangkan persetujuan atas dokumen UKL-UPL ditetapkan dalam Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH).

"Hasil pemeriksaan terkait pengajuan permohonan Persetujuan Lingkungan diketahui terdapat ketidakharmonisan persyaratan pengajuan dokumen Amdal dan formulir UKL-UPL dengan Perizinan Berusaha (PB) Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU) pada PP Nomor 5 Tahun 2021," demikian disampaikan BPK.

Pasal 26 PP Nomor 22 Tahun 2021 menetapkan bahwa Amdal terdiri atas Formulir Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL). Pengajuan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL harus dilengkapi dengan Persetujuan Teknis. Persetujuan Teknis terdiri atas pemenuhan baku mutu air limbah, baku mutu emisi, pengelolaan limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas. Kemudian, pasal 57 PP Nomor 22 Tahun 2021 menetapkan bahwa pengajuan formulir UKL-UPL dilengkapi dengan persetujuan teknis. Persetujuan teknis terdiri atas pemenuhan baku mutu air limbah, baku mutu emisi, pengelolaan limbah B3, dan/ atau analisis mengenai dampak lalu lintas.

Hasil pemeriksaan menunjukkan PP Nomor 5 Tahun 2021 pada sektor transportasi menetapkan bahwa Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) sebagai salah satu PB UMKU sektor transportasi. "Hal tersebut berdampak pada tidak dapat terpenuhinya dokumen persetujuan teknis dalam pengajuan permohonan SKKLH dan PKPLH."

Temuan BPK lainnya, migrasi data terkait dengan perubahan sistem OSS 1.1 menjadi sistem OSS RBA belum dilakukan secara memadai dan terdapat 291.112 pelaku usaha yang sejak lama belum jelas status perizinannya. Akibatnya, data hasil migrasi dari sistem OSS 1.1 ke OSS RBA belum sepenuhnya andal.

Perizinan persyaratan dasar yang merupakan kewenangan beberapa K/L juga belum sepenuhnya dapat diintegrasikan dalam sistem OSS RBA, sehingga menimbulkan kendala dalam penerbitan perizinan berusaha. Akibatnya, rencana penanaman modal pada daerah yang diuji petik yang memerlukan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) darat sebesar Rp115,45 triliun dan yang memerlukan persetujuan lingkungan sebesar Rp10,73 triliun tidak dapat diproses melalui OSS RBA.

Ada sejumlah rekomendasi yang disampaikan BPK kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM. Salah satu rekomendasi itu adalah berkoordinasi dengan menteri/pimpinan lembaga terkait untuk menginventarisasi dan menyelaraskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, antara lain yaitu: PP Nomor 5 Tahun 2021 dengan PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Kementerian Investasi/BKPM melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama dalam LHP yang disampaikan BPK menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK bahwa terdapat ketidaksesuaian/ disharmonisasi antara PP Nomor 5 Tahun 2021 dengan peraturan pelaksananya. Untuk itu, Kementerian Investasi/BKPM terus berkoordinasi dengan K/L dan instansi terkait dalam rangka harmonisasi PP Nomor 5 Tahun 2021 dengan peraturan K/L/I. Koordinasi dilakukan dalam rangka penyesuaian penanaman dalam sistem OSS dan sebagai masukan untuk perubahan/revisi PP Nomor 5 Tahun 2021 yang sedang dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pemeriksaan terkait upaya perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi juga dilakukan di daerah. Hasil pemeriksaan BPK menemukan bahwa pemda belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi dalam pelayanan perizinan. Hal ini karena sistem OSS RBA belum terintegrasi dengan aplikasi layanan persyaratan dasar perizinan, yaitu dengan aplikasi Sistem Informasi Geospasial Tataruang (GISTARU), Sistem Informasi Manajemen-Bangunan Gedung (SIMBG), dan aplikasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Akibatnya, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis belum dapat melakukan verifikasi atas pengajuan izin berusaha secara memadai.

Adapun pada pemeriksaan di Kemendagri, BPK mengungkapkan bahwa kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan belum seluruhnya dirumuskan dan ditetapkan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan turunannya yaitu PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 6 Tahun 2021. Hal ini menyebabkan kegiatan percepatan pemberian izin menjadi terhambat pada pemda yang belum mendelegasikan kewenangan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Pemeriksaan juga menemukan bahwa Kemendagri belum menetapkan SOP pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah. Permasalahan lain yang ditemukan, pembinaan Ditjen Bina Pembangunan Daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUKM) dan penanaman modal (PM) belum optimal dalam mendorong kemudahan berusaha di daerah. •

Sejumlah Rekomendasi BPK

Terkait Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi

Menteri Investasi/ Kepala BKPM agar:

- Berkoordinasi dengan menteri/ pimpinan lembaga terkait untuk menginventarisasi dan menyelaraskan ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, antara lain yaitu PP Nomor 5 Tahun 2021 dengan PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- Menginstruksikan sekretaris kementerian/ sekretaris utama mengoordinasikan Kepala Pusdatin Penanaman Modal untuk memutakhirkan mitigasi risiko dan memastikan keandalan data hasil migrasi OSS 1.1 ke OSS RBA, bersama-sama dengan Direktur Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha dan Direktur Wilayah I, II, III, dan IV menelusuri permasalahan 291.112 izin usaha yang belum efektif dan melaksanakan langkah-langkah penyelesaiannya.

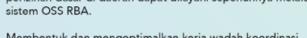
Menteri Dalam Negeri agar:

 Menetapkan SOP pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan perizinan pada DPMPTSP, SOP pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dan SOP pada Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) III serta pembaharuan SOP fasilitasi rancangan produk hukum daerah dan SOP pembinaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan.



Kepala Daerah agar:

- Memerintahkan Kepala OPD terkait untuk berkoordinasi dengan BKPM dan Kementerian Teknis agar segera mengintegrasikan sistem OSS RBA dengan aplikasi pelayanan perizinan dasar milik kementerian teknis sehingga pelayanan perizinan dasar di daerah dapat dilayani sepenuhnya melalui sistem OSS RBA.
- Membentuk dan mengoptimalkan kerja wadah koordinasi penanaman modal daerah yang beranggotakan OPD teknis terkait sehingga tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan kegiatan penanaman modal di daerah.



PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH BELUM TERARAH

Program pemberian bantuan kepada masyarakat pada Pemkab Kutai Timur belum diprioritaskan kepada warga miskin.



annie spratt-unsplash

rogram penanggulangan kemiskinan di daerah masih perlu diperbaiki, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam hal monitoring dan evaluasi (monev). Salah satu permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah belum terarahnya program penanggulangan kemiskinan.

BPK pada semester II 2021 melakukan pemeriksaan kinerja terkait dengan upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan. Pemeriksaan dilakukan pada dua pemerintah daerah (pemda), yaitu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur dan Pemkab Penajam Paser Utara.

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai salah satu upaya BPK untuk mendorong pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), utamanya tujuan ke-1 yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun. Hasil pemeriksaan tersebut juga sudah dicantumkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2021.

Untuk menanggulangi kemiskinan, Pemkab Kutai Timur diketahui telah menetapkan target tingkat kemiskinan sebesar 8,45 persen pada akhir 2021. Sementara, Pemkab Penajem Paser Utara telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan membentuk Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 16 temuan. Dari sisi perencanaan, fungsi kelembagaan dalam koordinasi penanggulangan kemiskinan pada Pemkab Kutai Timur belum optimal. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) belum dibentuk pada tahun 2016 dan 2018-2020, serta fungsi pengendalian dan koordinasi oleh TKPKD belum optimal.

Adapun pada Pemkab Penajam Paser Utara, pembentukan TKPKD belum sesuai dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Selain itu, pembentukan lembaga koordinasi, pengendalian dan pelayanan serta regulasi terkait penanggulangan kemiskinan belum optimal. Salah satunya, Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan belum sepenuhnya selaras dengan peraturan perundang-undangan.

"Akibat hal tersebut, pengelolaan program penanggulangan kemiskinan pada Pemkab Kutai Timur tidak terarah dan terkoordinasi dengan baik. Adapun pada Pemkab Penajam Paser Utara, penanggulangan kemiskinan tidak terarah dan tidak terpadu dan Perda Nomor 10 Tahun 2018 tidak bisa dijadikan dasar dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan," demikian disampaikan BPK dalam IHPS II 2021.

Perbaikan program penanggulangan kemiskinan juga perlu dibenahi dari sisi pelaksanaan. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan, program pemberian bantuan kepada masyarakat pada Pemkab Kutai Timur belum diprioritaskan kepada warga miskin. Sedangkan pada Pemkab Penajam Paser Utara pelaksanaan program penanggulangan ke-

miskinan belum sepenuhnya tepat sasaran, sesuai kebutuhan, dan bermanfaat.

Permasalahan tersebut menyebabkan tujuan program pemberian bantuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat miskin pada Pemkab Kutai Timur tidak tercapai. "Sedangkan pada Pemkab Penajam Paser Utara, masyarakat miskin tidak mendapatkan manfaat dari program-program penanggulangan kemiskinan."

Dari sisi monev, kegiatan dan program penanggulangan kemiskinan pada kedua pemkab belum dilakukan secara optimal, antara lain, pemkab belum menyusun instrumen monev atas penanggulangan kemiskinan. Kemudian, kegiatan monev atas pelaksanaan program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan pada tingkat organisasi perangkat daerah tidak dilaksanakan secara memadai.

Akibatnya, Pemkab Kutai Timur tidak dapat mengukur pencapaian tujuan dan ketepatan sasaran program pemberian bantuan serta tidak dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk ditindaklanjuti dengan solusi perbaikan.

Dampak lainnya, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan pada Pemkab Penajam Paser Utara menjadi tidak terarah, terpadu, dan berkelanjutan, serta adanya potensi target program penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD tidak tercapai.

Rekomendasi BPK kepada Bupati Kutai Timur dan Bupati Penajam Paser Utara Terkait Program Penanggulangan Kemiskinan

- Bupati Kutai Timur agar menetapkan SK TKPKD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 dan menginstruksikan TKPKD melaksanakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- Bupati Penajam Paser Utara agar merevisi SK Pembentukan TKPK Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai dengan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, dan menginstruksikan Ketua TKPK untuk melakukan sosialisasi SK TKPK, menjalankan tugas dan fungsinya dan mengkaji keselarasan Perda Nomor 10 tahun 2018 dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
- Bupati Kutai Timur dan Bupati Penajam Paser Utara agar menginstruksikan Kepala OPD terkait menggunakan basis data DTKS sebagai sumber data utama dalam penentuan sasaran penerima bantuan dan/atau pemberdayaan, serta sasaran penerima manfaat.
- Bupati Kutai Timur agar menginstruksikan TKPKD melaksanakan tugas dan fungsi kegiatan monev dan menyampaikannya kepada Bupati.
- Bupati Penajam Paser Utara agar menginstruksikan TKPK untuk menyusun instrumen pelaksanaan monev program penanggulangan kemiskinan, serta melaksanakan dan melaporkannya kepada Bupati dan TKPK provinsi. Selain itu, menginstruksikan kepala OPD untuk menyusun dan menyampaikan laporan monev program penanggulangan kemiskinan yang menggambarkan capaian program dan kegiatan kepada TKPK.

jcomp-freepi

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) meraih penghargaan dalam

The 7th Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2022

Sebagai Lembaga Terpopuler di Media Cetak Tahun 2021

Pemberian penghargaan dilaksanakan di Jawa Tengah pada 25 Maret 2022.



PEMENUHAN KEBUTUHAN GURU MADRASAH BELUM MERATA

Kementerian Agama belum memiliki analisis atau perhitungan kebutuhan kuantitas guru madrasah yang memadai.



pendis.kemenag.go.id

adan Pemeriksa Keuangan (BPK) merekomendasikan Menteri Agama untuk menyusun peta jalan (roadmap) terkait pemenuhan kebutuhan guru madrasah. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, pemenuhan kebutuhan kuantitas guru madrasah belum merata.

Hal tersebut terungkap dalam pemeriksaan yang dilakukan BPK atas efektivitas pemenuhan kebutuhan guru madrasah tahun 2019 sampai dengan 2021 (semester I). Pemeriksaan dilakukan terhadap Ditjen Pendis Kementerian Agama.

Seperti disampaikan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2021, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan bahwa Kementerian Agama telah melakukan beberapa upaya terkait pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Kementerian Agama telah memiliki Sistem Informasi dan Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Simpatika) dan menyediakan alat bantu di aplikasi tersebut, yaitu dashboard business intelligence (dashboard BI) untuk melakukan pemetaan atas kebutuhan guru madrasah.

Selain itu, Kementerian Agama juga melakukan pemetaan atas jumlah guru madrasah yang belum berkualifikasi S-1/D-IV serta bagi yang belum bersertifikat pendidik dan guru bukan pegawai negeri sipil (GBPNS) bersertifikat pendidik yang belum inpassing melalui Simpatika.

Kendati demikian, hasil pemeriksaan menunjukkan ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan. Menurut pemeriksaan BPK, Kementerian Agama belum memenuhi kebutuhan kuantitas guru madrasah secara merata sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan data Simpatika per 11 November 2021, terdapat kekurangan guru sebanyak 56.756 orang.



Kemudian, Kementerian Agama belum memiliki analisis/perhitungan kebutuhan kuantitas guru madrasah yang memadai. Di antaranya belum memiliki perumusan/pemetaan jumlah kebutuhan guru madrasah yang memadai dan proses pengusulan kebutuhan CPNS guru madrasah belum dilaksanakan secara optimal.

Kementerian Agama juga belum memperhitungkan ketersediaan guru PNS dipekerjakan (DPK) di daerah masing-masing dalam mengusulkan kebutuhan PNS guru madrasah. "Akibatnya pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga pendidik yang merata dan sesuai kebutuhan madrasah untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas belum optimal," demikian dikutip dari IHPS II 2021.

Temuan lain BPK, Kementerian Agama belum memiliki database yang valid, mutakhir, dan memuat seluruh data guru madrasah. Lalu, Kementerian Agama belum sepenuhnya memutakhirkan sistem informasi pengelolaan data guru madrasah.

Verifikasi dan validasi database guru madrasah belum sepenuhnya menjamin keandalan/kredibilitas data di Simpatika saling terintegrasi. Kebijakan terkait integrasi sistem informasi pengelolaan data guru madrasah belum diimplementasikan dan data guru madrasah yang disajikan antarsistem informasi berbeda. Permasalahan itu menyebabkan data guru madrasah belum dapat sepenuhnya dimanfaatkan dalam rangka pengambilan keputusan.

Selain itu, Kementerian Agama belum memenuhi kebutuhan kualitas guru madrasah secara memadai. Dari 699.495 guru, terdapat 48.086 guru atau 6,87 persen yang belum memenuhi kualifikasi S-1/D-IV dan 441.030 guru atau 63,05 persen yang belum bersertifikasi. Terdapat juga guru yang mengajar tidak linier dengan kualifikasi program studi akademik S-1 dan/atau sertifikasinya.

Kementerian Agama juga diketahui belum memiliki *roadmap*, anggaran, dan strategi yang jelas untuk pemenuhan kualifikasi guru madrasah, serta belum melakukan pembinaan dan evaluasi atas kualitas guru pada madrasah swasta. "Akibatnya, pemenuhan kualifikasi minimal guru madrasah sesuai UU menjadi terhambat, kualitas pembelajaran pendidikan madrasah menjadi belum optimal, dan hak guru madrasah belum sepenuhnya terpenuhi." •

PENGELOLAAN PNBP DI KKP PERLU DIPERKUAT

Negara kehilangan kesempatan memperoleh potensi PNBP sebesar Rp1,08 triliun.

adan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Kepatuhan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perizinan tahun 2020 hingga triwulan III 2021 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dirampungkan pada 31 Desember 2021, BPK mengungkapkan terdapat permasalahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan atas pengelolaan PNBP Perizinan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan (SDI), Ruang Laut (RL), dan Pulau-Pulau Kecil (PPK).

Permasalahan signifikan yang terungkap dalam pemeriksaan tersebut antara lain KKP belum mengintensifkan perolehan PNBP Perizinan Pemanfaatan RL untuk kegiatan pemasangan pipa dan kabel bawah laut. Selain itu, KKP juga belum mendata seluruh objek PNBP Perizinan terkait pemanfaatan PPK dan perairan di sekitarnya.

BPK juga menemukan, pengusulan dan/atau penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) tidak dilakukan secara periodik, serta penetapan HPI dan produktivitas kapal pada 2021 belum dilengkapi kajian teknis berbasis regulatory impact analysis. Sistem informasi yang dibangun KKP juga belum dapat mendukung identifikasi seluruh objek PNBP SDA perikanan tangkap. Database kapal perikanan KKP pun belum disinkronisasi dengan database kapal pada Kementerian Perhubungan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan negara kehilangan kesempatan memperoleh potensi PNBP sebesar Rp1,08 triliun. BPK merekomendasikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) agar menginstruksikan Dirjen Perikanan Tangkap untuk menetapkan kebijakan yang membakukan proses penetapan HPI secara periodik. BPK juga meminta Menteri KP untuk menyusun kajian teknis berbasis regulatory impact analysis terkait keputusan Menteri KP Tahun 2021 tentang HPI dan Produktivitas Kapal untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan (PHP).

BPK mengungkapkan, KKP belum mendata seluruh objek PNBP perizinan terkait pemanfaatan PPK dalam rangka intensifikasi perolehan PNBP. Hal itu antara lain sebanyak 100 pelaku usaha belum memiliki izin/rekomendasi pemanfaatan PPK. Hal ini mengakibatkan perkiraan potensi PNBP izin pemanfaatan PPK belum dipungut sebesar Rp17,65 miliar.

BPK pun merekomendasikan Menteri KP antara lain agar menetapkan kebijakan penerbitan izin/rekomendasi dan pengenaan PNBP atas kegiatan pemanfaatan PPK dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri yang dilakukan sebelum diterbitkannya Keputusan Menteri KP Nomor 24 Tahun 2020 dan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP. Menteri KP juga perlu menginstruksikan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut untuk mendata kegiatan pemanfaatan PPK serta melakukan sosialisasi ketentuan perizinan dasar dan perizinan berusaha kegiatan pemanfaatan PPK kepada para pelaku usaha dan pemangku kepentingan.

Selain itu, terdapat potensi PNBP berindikasi belum dipungut sebesar Rp 17,16 miliar. Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pengelolaan PNBP Perizinan Pemanfaatan SDI, RL, dan PPK pada 2020 hingga triwulan III 2021 juga belum sepenuhnya efektif mendukung kepatuhan pengelolaan PNBP perizinan.

MENJAGA PENGELOLAAN PENDAPATAN BLU KEMENHUB

Terdapat kekurangan penerimaan jasa sewa simulator pada PPI Curug sebesar Rp489 juta.

PK telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan pendapatan dan belanja pada tujuh Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan. Pemeriksaan dilakukan untuk Tahun Anggaran (TA) 2019 hingga September 2020. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai pengelolaan pendapatan dan belanja pada tujuh BLU telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPSDM Perhubungan memiliki 23 BLU yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat. BLU tersebut tersebar pada tiga Pusat Pengembangan SDM yakni Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat, Laut, dan Udara.

Dikutip dari laporan hasil pemeriksaan (LHP), BPK mengungkapkan permasalahan dalam pengelolaan pendapatan dan piutang pada tiga satker BLU Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan antara lain pengelolaan pendapatan sewa asrama pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug tidak memadai.

Selain itu, pendapatan Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) dari hasil kerja sama dengan Institut Transportasi dan Logistik (ITL) Trisakti belum tertagih. Kemudian, terdapat pengendalian pengelolaan pendapatan dan piutang pada Politeknik



dephub.go.i

Penerbangan Indonesia (PPI) Curug yang tidak memadai. Hal ini mengakibatkan antara lain realisasi penerimaan di BP3 Curug tidak akurat serta berisiko terjadi penyalahgunaan kas negara, potensi piutang atas kontribusi biaya pendidikan dari ITL Trisakti yang tidak tertagih, dan potensi pendapatan yang tidak diterima PPI Curug.

Khusus untuk PPI Curug, terdapat kekurangan penerimaan jasa sewa simulator pada PPI Curug sebesar Rp489 juta. Terdapat kekurangan penagihan sewa penggunaan simulator antara lain kurang penagihan kepada PT ASP sebesar Rp426 juta. Hal itu terdiri atas tagihan pada 2019 sebesar Rp406 juta dan pada 2020 sebesar Rp 20 juta. Hal ini karena kesalahan rekapitulasi dan perbedaan penetapan tarif per jenis mesin simulator.

BPK merekomendasikan kepada Menteri Perhubungan agar menginstruksikan Kepala BPSDM Perhubungan untuk memerintahkan Direktur PPI Curug untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dan penerimaan sewa simulator. Menhub juga bisa memberikan sanksi kepada Kepala Unit Pengelolaan Simulator Pesawat Komersil yang lalai dalam melakukan rekapitulasi dan melaporkan penggunaan simulator.

Kemudian, Menhub dapat memberikan sanksi kepada Kasubbag Humas dan Pengembangan Usaha, Bendahara Penerimaan, dan Kasubbag Keuangan untuk tidak melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung penagihan.

BPK juga merekomendasikan Menteri
Perhubungan agar menginstruksikan Kepala
BPSDM Perhubungan antara lain untuk memerintahkan Kepala BLU untuk memberikan sanksi kepada Kepala Seksi, Kasubbag, dan pengelola aset yang kurang optimal dalam pengelolaan PNBP.
BPK juga meminta kepada kepala BLU untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penatausahaan pendapatan BLU.



MENCEGAH RISIKO KESEHATAN MASYARAKAT DARI HASIL PERIKANAN BUDI DAYA

KKP belum secara aktif berbagi data lintas sektor yang dapat digunakan dalam kegiatan surveillance untuk mendeteksi dampak penggunaan antimikroba dan resistensi antimikroba.

PK telah melaksanakan pemeriksaan kinerja atas Kesiapan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Dampak Penggunaan Antimikroba serta Resistensi Antimikroba Terhadap Risiko Kesehatan Masyarakat yang Berasal dari Hasil Perikanan Budi Daya pada 2020 sampai triwulan III 2021 pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta instansi terkait lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Lampung, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Pemeriksaan ini juga dimaksudkan dalam mendorong

realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang selaras dengan implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) dan mendorong penguatan kapasitas KKP untuk menghadapi kejadian luar biasa (KLB) seperti endemi atau pandemi penyakit, terutama penguatan untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons secara cepat atas setiap ancaman kesehatan masyarakat. Salah satu ancaman yang serius adalah penggunaan antibiotik yang tidak tepat, sehingga menimbulkan resistensi antimikroba (antimicrobial resistance/AMR).



KKP belum secara aktif berbagi data lintas sektor yang dapat digunakan dalam kegiatan surveillance untuk mendeteksi dampak penggunaan antimikroba dan resistensi antimikroba. Hal tersebut mengakibatkan belum tercapainya sistem kesehatan nasional dengan pendekatan one health.

BPK mencatat upaya dan capaian yang telah dilakukan KKP dalam melaksanakan kegiatan mencegah, mendeteksi, dan merespons dampak penggunaan antimikroba dan resistensi antimikroba terhadap risiko kesehatan masyarakat yang berasal dari hasil perikanan budi daya antara lain dalam hal kewenangan dan peran serta perencanaan, kebijakan dan regulasi, KKP telah memperoleh pendelegasian kewenangan dan berupaya untuk berperan dalam memperkuat sistem kesehatan nasional. KKP juga memiliki strategi dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian resistensi antimikroba dan menerbitkan ketentuan untuk mendukung pengurangan risiko penggunaan antimikroba.

Dalam hal rumusan tugas, fungsi dan wewenang, anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana, KKP telah berupaya mengoptimalkan ketersediaan anggaran, memiliki norma, standar, prosedur, dan kriteria SDM, serta menetapkan laboratorium acuan dan laboratorium pengujian pengendalian resistensi antimikroba.

Dalam hal pelaksanaan upaya mencegah, mendeteksi, dan merespons, KKP telah memiliki regulasi tentang penentuan target penyakit dan lokasi rencana monitoring penyakit ikan, memiliki rencana surveillance dan/atau monitoring penyakit ikan, serta memiliki Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba. KKP juga memiliki rencana surveillance resistensi antimikroba, memiliki laboratorium acuan dan laboratorium pengujian, melaksanakan surveillance penggunaan antimikroba dan resistensi antimikroba, serta memberdayakan para pihak terkait dalam pengamatan dan pelaporan penggunaan antimikroba dan resistensi antimikroba.

Meski begitu, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih ada permasalahan yang dapat menghambat kesiapan KKP dalam kegiatan mencegah, mendeteksi, dan merespons dampak penggunaan antimikroba dan resistensi antimikroba terhadap risiko kesehatan masyarakat yang berasal dari hasil perikanan budi daya. KKP belum secara aktif berbagi data lintas

sektor yang dapat digunakan dalam kegiatan surveillance untuk mendeteksi dampak penggunaan antimikroba dan resistensi antimikroba. Hal tersebut mengakibatkan belum tercapainya sistem kesehatan nasional dengan pendekatan one health.

Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba Perikanan Budi Daya belum merumuskan kebijakan, menyelesaikan permasalahan, menyusun rencana aksi, dan pedoman, serta mengevaluasi pelaksanaan pengendalian resistensi antimikroba perikanan budi daya. Hal tersebut mengakibatkan potensi belum terwujudnya implementasi penggunaan antimikroba yang benar/tepat dan surveillance resistensi antimikroba yang baik pada perikanan budi daya.

KKP juga belum melakukan kerja sama lintas sektor dalam bidang resistensi antimikroba, metode diagnostik, antimikroba baru, dan inovasi pengganti antibiotik. Hal tersebut mengakibatkan wabah penyakit yang terjadi pada masyarakat sebagai dampak atas penggunaan antimikroba dan resistensi antimikroba dari perikanan budidaya belum dapat dideteksi secara terukur.

Atas permasalahan tersebut, BPK mere-komendasikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) untuk segera melakukan perbaikan. Hal itu antara lain menginstruksikan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya untuk berbagi data dan informasi hasil surveillance dengan kementerian/lembaga lain yang terkait secara berkala. Hal itu guna mewujudkan sistem kesehatan nasional dengan pendekatan one health.

Menteri KP juga perlu memerintahkan Tim Pengendalian Resistensi Antimikroba Perikanan Budi Daya untuk segera melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas secara berkala. Selain itu, Menteri KP perlu menjalin kerja sama dalam negeri terkait kegiatan riset dalam bidang resistensi antimikroba, metode diagnostik, antimikroba baru, dan inovasi pengganti antibiotik. •

Meningkatkari Imunitas Tubuh

Berjemur setiap hari selama 10-15 menit sebelum jam 9 pagi dan/atau setelah jam 3 sore.

Menghindari rokok dan minuman beralkohol.



Olahraga dengan intensitas ringan/sedang.

Batasi berita tentang pandemi.



Konseling *online* dengan psikolog atau dokter kesehatan jiwa apabila cemas dan stres mengganggu.



Meditasi dan tidur yang cukup.

3

Interaksi virtual dengan keluarga dan teman.



Beraktivitas seperti biasa di ruang isolasi mandiri.



4

Tunda Olahraga Jika:

- 1. Sesak napas dengan saturasi oksigen <95% saat istirahat.
- 2. Demam selama 2 hari terakhir.
- 3. Nyeri dada, nyeri kepala.
- 4. Batuk terus menerus.





MEMAHAMI MAKNA SERTA FUNGSI ISSAI 200 DAN ISSAI 2000

ISSAI bersifat internasional dan digunakan oleh berbagai negara. Namun, ISSAI tidak bisa menggantikan aturan hukum yang berlaku di suatu negara.





upreme audit institution (SAI) atau lembaga pemeriksa memiliki standar yang menjadi acuan dalam menjalankan tugasnya. Di lingkup internasional, standar yang berlaku bagi SAI di seluruh dunia adalah International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI).

Kepala Subdirektorat Litbang Kelembagaan BPK Dian Primartanto menjelaskan, ISSAI disusun oleh Organisasi SAI Internasional atau International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Beberapa pedoman yang dikeluarkan INTOSAI adalah ISSAI 200 tentang Fundamental Principles of Financial Auditing dan ISSAI 2000 mengenai Application of the Financial Audit Standards.

"Jadi, bila Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) hanya berlaku bagi insan BPK, maka ada standar lain yang juga menaungi pemeriksa BPK dan pemeriksa dari SAI di seluruh dunia yang disebut dengan ISSAI," kata Dian dalam webinar Litbang Live ke-102 yang mengangkat tema ISSAI 200 dan ISSAI 2000.

Dia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, standar yang dimaksud dalam SPKN adalah patokan untuk pemeriksaan atau penanda batas terkait hal-hal yang harus dipenuhi oleh pemeriksa dalam pelaksanaan tugas. "Yang mana standarnya ada tiga jenis patokan. Apabila tidak memenuhi salah satunya, maka tidak sah pemeriksaannya," kata dia.

Sedangkan ISSAI 200 merupakan standar internasional yang dibuat oleh INTOSAI, yang harus diikuti SAI seluruh dunia termasuk BPK. Kode '200' di belakangnya juga diikuti kalimat prinsip fundamental dalam melakukan sebuah pemeriksaan. ISSAI 200, ucap Dian, tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, pemeriksa tidak hanya wajib memahami ISSAI 200, tapi juga ada hal lain yang menjadi patokan.

la menjelaskan, ada tiga kategori yang menjadi turunan dalam ISSAI 200. Pertama, INTOSAI Principles yang berisi prinsip-prinsip sebuah SAI, yang di dalamnya terdapat prinsip pendirian dan prinsip dasar. Prinsip pendirian itu menjadi alasan sebuah lembaga pemeriksa dibentuk, sehingga juga memerlukan dasar hukum. Kedua, lembaga pemeriksa wajib memiliki prinsip-prinsip dasar, seperti halnya prinsip dasar BPK yaitu Independensi, Integritas, dan Profesionalisme. "Tidak akan berdiri BPK yang kuat kalau mandatnya atau prinsipnya enggak ada," ucap dia.

Setelah *Principles*, barulah diturunkan ke standar, yaitu hal-hal apa yang harus dipenuhi atau prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara. Ada persyaratan yang harus dipenuhi sebuah organisasi atau *organizational requirement*.



Kita harus punya kode etik supaya prinsip-prinsip Independensi, Integritas, dan Profesionalisme tadi terjaga. Kemudian, harus punya pengendalian mutu. Ada juga standar kompetensi, karena agar profesional kita harus kompeten.

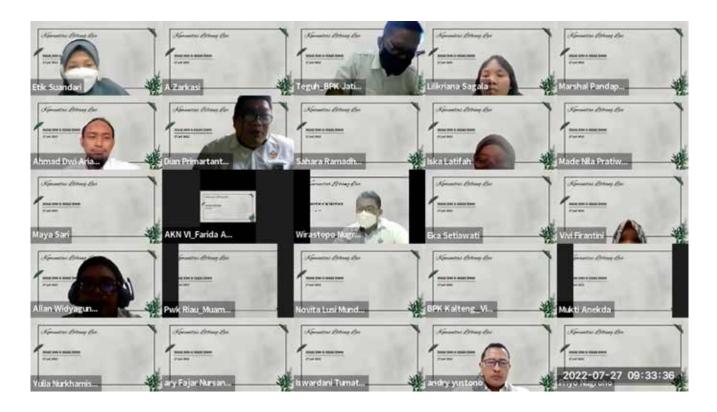


"Kita harus punya kode etik supaya prinsip-prinsip Independensi, Integritas, dan Profesionalisme tadi terjaga. Kemudian, harus punya pengendalian mutu. Ada juga standar kompetensi, karena agar profesional kita harus kompeten," katanya.

Oleh karena itu, ia menjelaskan bahwa INTOSAI tidak langsung menyinggung soal kinerja pemeriksaan, melainkan terlebih dahulu mengedepankan soal kesiapan organisasi, yaitu organisasi yang memiliki persyaratan dan prinsip utama. Setelah itu, INTOSAI baru masuk ke per jenis pemeriksaan. "Ada performance, ada

compliance. Mandat harus menjadi salah satu prinsip pemeriksaan keuangan negara. Ini tidak lepas dari prinsip-prinsip yang umum, tidak lepas dari pengendalian mutu," tutur dia.

Hal lain yang patut dipahami, kata dia, ISSAI bersifat internasional dan digunakan oleh berbagai negara. Di lingkup internasional, sebuah profesionalisme dimaknai sebagai keharusan untuk mematuhi aturan hukum. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa INTOSAI telah menyampaikan bahwa aturan tersebut tidak menggantikan atau tetap mengacu pada aturan hukum sebuah negara atau mandat sebuah SAI.





Dengan kata lain, ISSAI tidak bisa menggantikan aturan hukum. Atas alasan itu, hal yang pertama kali disebutkan dalam ISSAI adalah mandat. Makanya, sedari awal INTOSAI mempromosikan ISSAI sebagai audit yang independen dan efektif dalam koridor mandat. Selain itu, untuk menjadi dasar anggota INTOSAI dalam mengembangkan masing-masing standarnya.

"Jadi dalam ISSAI itu pun ada beberapa level, kalau memang sudah mature silahkan bikin sendiri. Seperti kita BPK sudah bisa membuat sendiri SPKN, nanti tinggal kemudian mengacu kepada ISSAI. Tapi kalau yang belum siap, ya pakai saja ISSAI. Jadi, ISSAI pun memberikan pilihan untuk mengembangkan sesuai hukum dan aturan yang berlaku di masing-masing negara," ucap dia.

Terkait kerangka ISSAI, ada
ISSAI 100 yang berisi prinsip-prinsip pemeriksaan
sektor publik. SPKN BPK untuk saat ini sudah
mengadaptasi substansi ISSAI 100. Kemudian,
ada ISSAI per jenis pemeriksaan seperti ISSAI
200 dan ISSAI 2000. Namun, dalam penggunaannya, ISSAI 200 dan ISSAI 2000 tidak bisa
berdiri sendiri. Harus dibaca bersamaan dengan
ISSAI 100.

ISSAI 200 juga memiliki lingkup pengaturan. Di dalamnya ada prinsip-prinsip minimal yang harus dipenuhi. Adapun obyek dari ISSAI 200 berupa International Standard on Auditing (ISA) 720, ISA 800 dan ISA 805. ISA 720 mengenai Tanggung Jawab Auditor atas Informasi Lain dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Auditan. Kemudian, ISA 800 tentang Pertimbangan Khusus-Audit atas Laporan Keuangan yang Disusun Sesuai dengan Kerangka Bertujuan Khusus. Adapun ISA 805 tentang

Pertimbangan Khusus-Audit atas Laporan Keuangan Tunggal dan Unsur, Akun, atau Pos Spesifik dalam Suatu Laporan Keuangan

"Nah ISSAI 200 ini berlaku untuk semua itu. Jadi apapun laporan keuangannya, bisa kita periksa pakai ISSAI 200 ini," ucap dia.

Berbeda dengan pemeriksaan keuangan yang lain, laporan keuangan disajikan dalam suatu kerangka tertentu yang biasa disebut kerangka pelaporan keuangan (KPK). Ketika pemeriksa ingin melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan, maka laporan yang diperiksa harus sudah dalam bentuk kerangka pelaporan keuangan, dalam hal ini adalah kerangka standar akuntansi pemeriksaan. "Itulah yang menjadi objek pemeriksaan keuangan."

"Kalau kita bedakan dengan pemeriksaan kinerja, adalah bentuk kerangka tadi. Kalau kinerja tidak ada kerangkanya. Jadi yang menandakan adalah pemeriksa harus tahu terlebih dulu

> kerangka pelaporan apa yang dibuat oleh si penyusun laporan ini," katanya.

Ia menjelaskan, ada dua jenis kerangka KPK berdasarkan ciri opini. Pertama, kerangka wajar dimana laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal materal, misalnya SAP, SAK, IPSAS dan lainlain. Kedua adalah kerangka kepatuhan yang bermakna laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, misalnya ke-

rangka pelaporan keuangan untuk perpajakan.

Dia menambahkan, tujuan pemeriksaan laporan keuangan untuk memberikan pemahaman yang memadai melalui bukti audit yang cukup dan tepat. Sumber kriterianya adalah kerangka yang menjadi acuan penyusunan laporan keuangan. "Reasonable assurance itu kenapa dikatakan reasonable karena apabila ada suatu hal yang tidak logis di audit, ada sesuatu yang something wrong di audit kita, kita harus yakin dengan pekerjaan kita, baru kita bisa meyakinkan publik atas pemeriksaan laporan keuangan kita."

ISSAI juga mengenal short form audit report dan long form audit report. Short form audit report memiliki opini, sementara long form audit report juga memiliki laporan hasil pemeriksaan. Adapun praktik yang dilakukan BPK adalah long form audit report karena BPK memberikan opini dan temuan.

Tidak akan berdiri BPK yang kuat kalau mandatnya atau prinsipnya enggak ada.

Protokol Isoman

Ada kamar terpisah

- Usahakan kamar memiliki jendela yang dapat dibuka & sirkulasi udara lancar.
- Pasien tidak perlu memakai masker selama di kamar.

Tidak ada kamar terpisah

- Usahakan tidak kontak langsung dengan keluarga dan selalu memakai masker.
- Gunakan masker ganda (masker bedah di bagian dalam dan masker kain di luar).
- Area yang dilalui pasien dapat langsung disemprot dengan disinfektan aerosol.

Penanganan pakaian

Cuci pakaian secara terpisah dari pakaian anggota keluarga lainnya.

Gunakan deterjen.

Bila perlu gunakan air hangat.

Cuci tangan dengan sabun setelah mencuci.



Penanganan sampah

Sampah infeksius dikumpulkan dalam satu kantong plastik pada tempat sampah tertutup dan ditandai "limbah infeksius" Sampah tidak perlu dibakar.

Bersihkan tempat sampah dengan disinfektan sebelum diisi kantong sampah baru.



Penanganan ruangan

- Semprot ruangan dengan disinfektan aerosol agar daya tebarnya lebih luas.
- Simpan peralatan mandi pasien, seperti sikat gigi dan sabun di ruangan terpisah.
- Bersihkan permukaan benda yang sering disentuh oleh pasien dengan disinfektan.
- Semprot, tutup, dan diamkan kamar mandi 15-30 menit sebelum dipakai kembali.





DARI TECHNICAL MEETING MENUJU SUMMIT SAI20

Penyelenggaraan SAI20 Technical Meeting dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif. Tujuannya, untuk menegaskan posisi dan peran SAI20 dalam kerangka G20 dan berdiskusi mengenai *rules of procedures* (RoP).

upreme Audit Institution 20 (SAI20) akan menjadi suatu legacy bagi Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Khususnya dalam mewujudkan peran serta SAI dalam mengatasi berbagai tantangan global untuk pulih dari krisis akibat pandemi Covid-19 dan upaya mempercepat pencapaian target SDGs.

Lalu, seperti apa perjalanan SAI20? Berdasarkan "Buku Saku SAI20", perjalanan pembentukan SAI20 meliputi penyusunan konsep yang digunakan dalam pembahasan pertemuan teknis, pertemuan pejabat senior, dan konferensi tingkat tinggi (KTT).

Rangkaian SAI20 dimulai dengan kegiatan technical meeting di Nusa Dua, Bali pada 26-27 Januari 2022. Dalam kegiatan ini, ditekankan pentingnya peran SAI20 dalam upaya pemulihan ekonomi. Yaitu, dengan memastikan terciptanya governance resilience, business sustainability, serta pencapaian Agenda 2030.









■ Ketua BPK Isma Yatun

Dalam kegiatan tersebut juga diresmikan situs www.sai20.org yang berfungsi sebagai media sharing knowledge antaranggota SAI20, termasuk dengan pihak eksternal. Penyelenggaraan SAI20 Technical Meeting dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif. Tujuannya, untuk menegaskan posisi dan peran SAI20 dalam kerangka G20 dan berdiskusi mengenai rules of procedures (RoP). Termasuk menjaring masukan, respons, dan feedback dari anggota SAI20 untuk memperkaya issue notes mengenai percepatan pemulihan ekonomi pasca-Covid-19 dan percepatan pencapaian target SDGs.

Kegiatan ini diikuti oleh 11 SAI negara anggota G20, yaitu SAI Argentina, Australia, Brasil, Cina, India, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, dan Turkiye. Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh beberapa SAI negara sahabat, seperti SAI Peru, Polandia, dan Uni Emirat Arab (UEA).

Kegiatan technical meeting juga dihadiri observers dari engagement group dan working group G20. Mulai dari Business20, Civil20, Urban20, Youth20, Anti-Corruption Working Group (ACWG), Trade Investment, and Industry Working Group (TIIWG), Development Working Group (DWG), Environment and Climate Sustainability Working Group (ECSWG), dan Digital

Economy Working Group (DEWG).

Beberapa tamu kehormatan dari organisasi internasional juga hadir seperti World Bank, UNESCAP, INTOSAI General Secretariat, serta duta besar/wakil duta besar Swiss dan Polandia. Termasuk perwakilan dari beberapa organisasi lain, seperti Open Contracting Partnership dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Kegiatan ini menghasilkan *output* berupa, (1) masukan untuk RoP dan (2) input serta *feedback* para anggota mengenai isu prioritas. Beberapa masukan yang diperoleh dari anggota SAI20 akan dielaborasi lebih lanjut untuk penyempurnaan RoP dan *issue notes*. Kedua dokumen ini akan menjadi dasar dalam menghasilkan *position paper* dan *output* dokumen *communiqué* SAI20.

Selanjutnya, digelar SAI20 Senior Officials Meeting (SOM) secara hibrida di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada 20-21 Juni 2022. SOM diselenggarakan untuk memperoleh dukungan dari anggota SAI20 atas RoP dan menyusun zero draft komunike SAI20.

Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan keynote speech mengenai peran penting SAI20 sebagai mitra strategis G20. Khususnya dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana publik dalam mengatasi pandemi.

SAI20 RECOVER TOGETHER RECOVER STRONGER

Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L Marsudi dalam pidatonya menyebutkan peran SAI20 yang tidak hanya mendorong percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi dan mendukung pencapaian SDGs. Akan tetapi juga untuk mendorong good governance di level global.

SAI20 SOM diikuti oleh 12 SAI negara anggota G20, baik secara fisik maupun virtual. Mereka adalah SAI Argentina, Australia, Brasil, Cina, India, Indonesia, Meksiko, Republik Korea, Federasi Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Turkiye. Undangan dari SAI lain termasuk SAI Spanyol dan SAI UEA, serta perwakilan duta besar Polandia. Perwakilan WG/EG G20, seperti ACWG, Y20, dan U20, juga ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Pada hari pertama SOM, chair of the meeting memulai dengan hasil SAI20 Technical Meeting yang telah digelar sebelumnya. Termasuk proses yang telah dilalui dalam menghasilkan dokumen RoP dan technical grids untuk masing-masing isu prioritas.

Dalam diskusi hari pertama dijelaskan bahwa RoP merupakan *living document* yang bersifat fleksibel yang mengatur sistem dan mekanisme kerja SAI20. Seluruh anggota yang hadir menyatakan dukungannya dan setuju untuk mengesahkan RoP agar dapat diadopsi saat KTT SAI20 di Nusa Dua, Bali pada 29-30 Agustus 2022.

Pada hari kedua, chair of the meeting memimpin diskusi mengenai zero draft komunike SAI20. Terdapat masukan dari anggota SAI20 untuk memperkaya dan menyempurnakan zero draft communique. Beberapa SAI menyoroti mandat untuk





memastikan transparansi dan akuntabilitas inisiatif dan program pemerintah dalam menggemakan program dan kegiatan pada komunitas INTOSAI.

Sesuai kesepakatan, first draft communique disirkulasikan pada 1 Juli 2022 kepada seluruh anggota SAI20 untuk masukan lebih lanjut. Masukan yang diterima selambat-lambatnya pada 15 Juli 2022 akan digunakan sebagai dasar penyusunan second draft communique. Sedangkan diskusi putaran terakhir dilaksanakan secara virtual pada 1 Agustus 2022. Pengesahan draft akhir komunike akan dilaksanakan pada SAI20 Summit pada 29-30 Agustus 2022.

Seperti diketahui, BPK Indonesia menjadi tuan rumah SAI20 Summit yang akan diselenggarakan di Sofitel Nusa Dua Hotel, Bali pada 29-30 Agustus 2022. Pertemuan ini merupakan kegiatan terakhir dari rangkaian pertemuan SAI20 tahun 2022 dan akan digelar dalam mode hibrida. SAI20 Summit bertujuan untuk membahas kontribusi nyata SAI terhadap kebutuhan mendesak akan transparansi dan akuntabilitas global. Kemudian menanggapi dampak pandemi, mempercepat pemulihan ekonomi, dan mendukung SDGs.

Dalam SAI20 Summit, akan disampaikan adopsi RoP sebagai dasar pembentukan SAI20 dan pengesahan draft komunike SAI20 sebagai suara 12 SAI negara anggota G20 dalam menanggapi dua isu prioritas SAI20. Setelah summit, komunike selanjutnya akan disampaikan kepada sherpa untuk dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut di ajang KTT G20 pada November 2022.





RECOVER TOGETHER RECOVER STRONGER



BPK BAHAS TRANSPORTASI BERKELANJUTAN BERSAMA SAO THAILAND DAN NAO CINA

BPK dan SAO Thailand memaparkan *audit case* atas hasil pemeriksaan terkait transportasi berkelanjutan yang mengacu kepada *audit guidance*.

adan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut terlibat dalam penyelenggaraan Assembly Meeting Asosiasi Badan Pemeriksa Keuangan Sedunia (INTOSAI) Working Group on Environmental Auditing (WGEA) di Ukulhas, Maladewa, pada 4-6 Juli 2022. Pada kesempatan itu, BPK sebagai ketua Work Package 4–Sustainable Transport, bersama dengan SAO Thailand dan NAO Cina, menyelenggarakan sesi terkait "Sustainable Transport".

Sesi yang dijalankan pada hari kedua penyelenggaraan INTOSAI WGEA mengambil tema pengaruh transportasi berkelanjutan untuk mitigasi perubahan iklim dan pencapaian komitmen Paris Agreement. Dalam sesi tersebut, diskusi panel menghadirkan ahli di bidang transportasi dari UNEP, Cina, dan Maladewa.

Delegasi dari BPK, Pitriyanti, juga memaparkan mengenai penyelesaian dari audit guidance terkait transportasi berkelanjutan. Selanjutnya, NAO Cina memaparkan mengenai perkembangan cooperative audit terkait transportasi berkelanjutan di ASOSAI WGEA.

Kemudian dipaparkan audit case atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan SAO Thailand terkait transportasi berkelanjutan yang mengacu kepada audit guidance tersebut. Pada kesempatan tersebut, audit case dari BPK dipaparkan oleh Normas Andi Ahmad.

INTOSAI WGEA merupakan kelompok kerja pemeriksaan lingkungan BPK se-dunia. BPK merupakan Ketua dan Sekretariat INTOSAI WGEA sejak 2014 sampai 2019. Pada pertemuan Assembly Meeting WGEA tersebut, juga dilaksanakan perayaan atas 30 tahun berdirinya WGEA.

INTOSAI WGEA dalam rencana kerjanya, melakukan kegiatan antara lain penyusunan audit guidance, penyusunan proyek penelitian, kerja sama pemeriksaan, penyelenggaraan survei dan pelatihan, serta diseminasi informasi terkait isuisu lingkungan.

Pertemuan INTOSAI WGEA di Maladewa digelar dengan mengangkat tema "Raising



 Peserta Assembly Meeting Asosiasi Badan Pemeriksa Keuangan Sedunia (INTOSAI) WGEA.

Resilience" dan dibuka oleh *Auditor General* dari AGO Maladewa, Hussain Niyazi. Pertemuan yang diselenggarakan secara hibrida itu dihadiri oleh 47 delegasi dari 21 SAIs secara luring dan lebih kurang 30 delegasi secara daring.

Pertemuan membahas isu lingkungan, terutama terkait dengan adaptasi perubahan iklim dan membangun ketahanan iklim. Pembicara yang dihadirkan secara daring dan langsung pada hari pertama antara lain Direktur UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) Ricardo Mena Speck. Kemudian Menteri Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim, dan Teknologi Maladewa Aminath Shauna dan Menteri Pariwisata Maladewa Ibrahim Rasheed Aboobakuru.

Kemudian pada hari ketiga, pertemuan membahas mengenai laporan SAI Finlandia selaku Sekretariat WGEA atas pelaksanaan work plan 2020-2022 serta pelaksanaan kegiatan terkait environmental auditing di regional SAIs. Dalam kesempatan tersebut, semua anggota WGEA memberikan persetujuan (approval) atas keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan dalam periode 2020-2022 tersebut.

Selanjutnya, dilakukan pembahasan atas fokus atas work plan 2023-2025 yang dilanjutkan dengan diskusi oleh anggota Steering Committee WGEA. Pada kesempatan ini, BPK menjadi salah satu anggotanya. Acara tersebut ditutup oleh Auditor General dari AGO Maladewa dan Chair dari INTOSAI WGEA, Sami Yläoutinen.

KETUA BPK PAPARKAN HASIL PEMERIKSAAN DI PERTEMUAN IMO COUNCIL

Kesempatan itu juga digunakan BPK untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Chair of Council IMO, Victor Jemenez dan Sekretaris Jenderal IMO, Kitack Lim.

adan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) di hadapan negara-negara anggota IMO. Ketua BPK, Isma Yatun menyampaikan mengenai pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja terhadap IMO yang telah dilaksanakan untuk tahun anggaran (TA) 2021.

Dijelaskan, pemeriksaan keuangan dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan IMO bebas dari salah saji dan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi sektor publik internasional (International Public Sector Accounting Standards/IPSAS). Sedangkan, pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai efektivitas manajemen di IMO.

Isma menyampaikan pernyataan tersebut pada saat menghadiri *The 127th Session of IMO Council Meeting* di kantor pusat IMO di London, Inggris pada Selasa (12/7). Hal ini terkait dengan peran BPK sebagai pemeriksa eksternal IMO.

"Laporan Keuangan IMO TA 2021 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan beberapa rekomendasi untuk perbaikan," kata Isma.

Untuk pemeriksaan kinerja, lanjut dia, tujuan pemeriksaan kinerja tahun 2021 adalah untuk menilai efektivitas pengelolaan Integrated Technical Cooperation Program (ITCP) IMO, terutama pada tahap perenca-





naan. Audit kinerja diharapkan dapat meningkatkan layanan organisasi yang relevan kepada negara-negara anggota.

Melalui pertemuan ini, kata Isma, dukungan strategis dan pengawasan IMO Council sangat penting untuk menyampaikan rekomendasi BPK terkait dengan hal tersebut. "Tindak lanjut atas rekomendasi BPK akan memberikan manfaat bagi IMO dan pemangku kepentingan terkait," ungkap dia.

Dalam akhir sambutan, Isma menyampaikan terima kasih kepada sekretaris jenderal dan manajemen IMO atas komitmen, keterlibatan positif dan konstruktif, serta profesionalisme yang ditunjukkan selama audit. BPK juga mengucapkan terima kasih kepada IMO Council atas kesempatan untuk mempresentasikan hasil pemeriksaannya dan mengharapkan kerja sama yang lebih kuat pada masa depan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi IMO.

Kesempatan itu juga digunakan BPK untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Chair of Council IMO, Victor Jemenez dan Sekretaris Jenderal IMO, Kitack Lim. Pertemuan digelar untuk membahas fokus dan strategi pemeriksaan selanjutnya.

Delegasi BPK lain yang ikut menghadiri pertemuan ini yaitu Penanggung Jawab Pemeriksaan Bahtiar Arif, Pengendali Teknis Pemeriksaan Nanik Rahayu, dan Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Kusuma Ayu Rusnasanti.



BPK BUKA PELUANG KERJA SAMA BILATERAL DENGAN UK NAO

Selain membuka kerja sama, Isma juga mendiskusikan peran dua lembaga pemeriksa sebagai auditor eksternal lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

etua Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Isma Yatun
membuka peluang untuk
melakukan kerja sama
dengan National Audit
Office-United Kingdom
(UK NAO) di bidang pemeriksaan sektor
publik. Hal ini dilakukan dalam rangkaian
kunjungan ke London untuk menghadiri International Maritime Organization
(IMO) Council.

Pada kesempatan itu, Isma melakukan pertemuan dengan Comptroller and Auditor General UK NAO, Gareth Davis di kantor UK NAO pada Rabu (13/7). Pada pertemuan itu, Davis menyampaikan sambutan baik atas usulan BPK untuk melakukan kerja sama bilateral.

Dia pun mengundang BPK untuk melakukan secondment di UK NAO dan melakukan kegiatan sharing knowledge atas isu yang menjadi perhatian bersama. Selain membuka kerja sama, Isma juga mendiskusikan peran dua lembaga pemeriksa sebagai auditor eksternal lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam perannya sebagai auditor eksernal, Isma mengapresiasi peran dan kontribusi UK NAO. Khususnya dalam kiprahnya sebagai auditor eksternal International Atomic Energy Agency (IAEA), International Maritime Organization (IMO), dan World Intellectual Property Organization (WIPO).

Karenanya pertemuan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi BPK yang saat ini sedang mencoba untuk menjadi auditor eksternal WIPO. Harapannya, BPK dapat belajar dari WIPO atas pengalaman UK

Dalam pertemuan ini, turut hadir Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif dan Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Kusuma Ayu Rusnasanti.

KETUA BPK SAMPAIKAN 3 POIN PENTING DI UN HLPF SIDE EVENT DI NEW YORK

Untuk menjaring peserta dari berbagai pemangku kepentingan, HLPF Side Event diselenggarakan secara hibrida. Kali ini, topik yang diusung yaitu "Accelerating implementation of the 2030 Agenda-The Contribution of Supreme Audit Institutions".

etua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menyampaikan pidato dalam United Nations High Level Political Forum (HLPF) Side Event di New York pada (15/7). Pada kesempatan ini, sebagai panelis, Isma menjelaskan mengenai tiga poin penting.

Pertama adalah bahwa lembaga pemeriksa (Supreme Audit Institution/SAI) memegang peran untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pencapaian The 2030 World Agenda. Atau biasa dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Kedua, kata dia, SAI dan pemerintah harus membangun suatu kolaborasi yang efektif dalam implementasi SDGs di negara masing-masing. "Ketiga adalah bahwa SAI hendaknya saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan pembelajaran tentang pelaksaan audit SDGs dengan SAI lainnya," kata dia.

Selain Ketua BPK, Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif juga memberikan paparan tentang pengalaman dalam melakukan reviu *Voluntary National Review* (VNR) Indonesia 2021. Dijelaskan, dalam reviu tersebut, BPK menetapkan tiga tujuan reviu.

Pertama, kata dia, menilai apakah pemerintah telah menyusun VNR Indonesia 2021 yang selaras dengan VNR Indonesia 2017 dan 2019. Kedua, mempertimbangkan hasil pemeriksaan BPK yang terkait dengan pencapaian SDGs di Indonesia.

"Ketiga, melakukan due process sesuai dengan Handbook for the Preparation of VNR 2021 Edition yang diterbitkan oleh United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA)," ungkap dia.

HLPF Side Event diselenggarakan oleh International Organization of Supreme Audit Institution (INTOSAI) Development Initiative (IDI). Turut bekerja sama juga







SAI dan pemerintah harus membangun suatu kolaborasi yang efektif dalam implementasi SDGs di negara masing-masing.

INTOSAI General Secretariat, INTOSAI Working Group on Environmental Auditing (WGEA), Permanent Mission of Austria to United Nations, dan Perutusan Tetap Republik Indonesia pada PBB (PTRI) di New York.

Untuk menjaring peserta dari berbagai pemangku kepentingan, HLPF Side Event diselenggarakan secara hibrida. Kali ini, topik yang diusung yaitu "Accelerating implementation of the 2030 Agenda-The Contribution of Supreme Audit Institutions".

Acara ini juga mengundang perwakilan SAI Amerika Serikat untuk memaparkan pengalaman audit terkait SDG 14 on Life Below Water: Auditing Marine Environment. Kemudian juga

SAI Brasil untuk memaparkan pengalaman audit terkait SDG 15 on Life on Land: Coordinated Audit on Protected Areas in Latin America.

Pada kesempatan ini, disampaikan juga paparan Director General of INTOSAI General Secretariat, Silke Steiner. Dia berbicara mengenai contribution of SAIs to the follow up and review of SDGs.

Kemudian, dilanjutkan juga dengan paparan IDI dan INTOSAI WGEA.
Dalam paparannya, Deputy Director General of IDI, Archana Shirsat, menjelaskan tentang SAI contribution to shape a resilient, equal, and sustainable future. Sementara Secretary General of INTOSAI WGEA, Vivi Niemenmaa, menerangkan tentang policy coherence dalam SDG 17.14.

Kehadiran BPK dalam HLPF Side Event ini membuktikan bahwa peran BPK dalam pencapaian SDGs di Indonesia telah diakui oleh komunitas internasional. Selain itu, BPK juga mendapatkan manfaat pembelajaran dan pengetahuan tentang audit yang dilaksanakan oleh SAI lainnya dalam usaha-usaha pencapaian SDGs di negara mereka. •

AHMAD ADIB SUSILO, AUDITOR UTAMA KEUANGAN NEGARA III BPK

JUNJUNG PROFESIONALISME DALAM BERKIPRAH DI BPK

agi Ahmad Adib Susilo, profesionalisme adalah kata yang sangat penting untuk diwujudkan dalam berkarier di BPK. Menurutnya, nilai dasar BPK yakni independensi, integritas, dan profesionalisme harus dikerjakan se-

cara utuh agar bisa memberikan hasil kerja yang bermanfaat bagi *stakeholders*.

Kepada *Warta Pemeriksa*, Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) III BPK itu juga membagikan kisah perjalanannya menimba karier di BPK. Berikut petikan wawancaranya.



■ Ahmad Adib Susilo

Bagaimana perjalanan karier Bapak di BPK sejak awal hingga saat ini?

Saya masuk BPK itu pada 1996. Saya lulus dari program D3 Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1996. Waktu itu, di STAN, ketika saya masih semester III sudah diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Jadi bisa juga dibilang saya masuk BPK itu pada 1995 dan begitu tahun berikutnya saya langsung menjadi PNS di BPK.

Waktu itu, saya masuk di BPK dan ditempatkan di AKN II di Subauditorat II.A.2. Ketika itu, kepala seksinya adalah Bapak Suryo Ekawoto Suryadi.

Saya masuk BPK ketika itu merasa nyaman karena pada saat itu bertemu dengan kepala seksi saya dan beliau orangnya sangat baik serta mendukung anak-anak muda yang bergabung BPK. Termasuk, beliau mendukung agar para pegawai BPK bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Kemudian, dengan dorongan dari orang tua dan pimpinan waktu itu, maka pada saat itu kami bersama teman-teman seangkatan bersepakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S1. Saya waktu itu dengan teman-teman ingin masuk kampus di Jakarta untuk mengambil program ekstensi.

Dari sana, kemudian kami lapor kepada pimpinan yaitu Kepala Pusdiklat saat itu yakni Bapak I Gusti Agung Rai. Singkat cerita, saya dan teman-teman seangkatan maupun teman-teman lain yang masih D3 saat itu, dikirim oleh kantor untuk mengambil S1 di Universitas Padjadjaran, Bandung. Saat itu terdapat 40 orang yang dikirim ke Bandung pada 1998.

Saya lulus dalam dua semester dan menyelesaikan skripsi. Awal 1999, saya menyelesaikan S1 dan kembali ke kantor pada pertengahan tahun. Kemudian, saya langsung mendaftar program seleksi S2 yang ada di kantor.

Alhamdulillah, saya lulus seleksi pada 1999. Kemudian, pada 2000 saya mendaftar sekolah S2 di Amerika Serikat. Saya sebenarnya sudah diterima di beberapa kampus di AS antara lain di Washington dan Ohio. Namun, mungkin ini sudah jalan yang ditetapkan Tuhan, saya tidak jadi berangkat karena waktu itu BPK membuat moratorium semua pengiriman S2 ke luar negeri harus ditunda.

Kemudian, saya akhirnya ikut beberapa pemeriksaan antara lain pemeriksaan Bank Indonesia (BI). Dulu, pada 1999 dan 2000 itu menjadi tahun awal pemeriksaan BI. Tim yang terlibat sangat diseleksi saat itu karena merupakan tim khusus. Kemudian, saya

Animo pegawai BPK untuk meningkatkan pendidikan juga luar biasa tinggi. Sehingga, itu menjadi perbedaan yang signifikan antara dulu dan sekarang.

juga terlibat dalam tim pemeriksaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Pada 2021, pimpinan meminta kepada kami yang sebelumnya batal berangkat kuliah ke luar negeri untuk mendaftar ulang. Kemudian, saya mendaftar ke Eropa tepatnya di Inggris. Saya kemudian diterima di beberapa tempat yaitu di London, Sheffield, Newcastle, dan Manchester, namun saya memutuskan berkuliah di Manchester.

Memang ini sejalan dengan apa yang pernah saya ucapkan pada kuliah di STAN. Saya sempat ditanya oleh teman sebangku saya, kenapa saya memilih berkantor di BPK. Saya menjawab, karena kesempatan sekolah ke luar negerinya lebih banyak. Ini berdasarkan cerita para senior saat itu.

Saya kemudian ditanya, kalau ke luar negeri mau ke mana. Saya jawab dengan tegas ke Manchester karena saya mau melihat David Beckham bermain sepakbola. Jadi, ternyata saya akhirnya kesampaian untuk ke Manchester seperti yang saya ucapkan itu. Setelah saya selesai kuliah, saya kembali memeriksa di lingkungan BI, BPPN, dan juga Ditjen Pajak.

Kemudian, pada 2006 mungkin menjadi *milestone* saya ketika dipercaya menjadi kepala seksi di AKN II BPK. Setelah itu, pada 2011 menjadi kepala subauditorat di AKN II BPK. Pada 2016, saya juga sempat dimutasi ke BPK Perwakilan Jawa Tengah.

Alhamdulillah, sejak 1 Juli 2022, saya diberikan kepercayaan menjadi Tortama di AKN III BPK. Tentunya, dalam perjalanan karier saya banyak sekali orang-orang yang mendampingi sejarah hidup saya di BPK.

Berdasarkan pandangan Bapak, apa perbedaan BPK dulu dan sekarang?

Perbedaan itu pasti muncul karena memang perubahan itu pasti. Tidak ada yang tidak berubah di dunia ini termasuk BPK. Banyak hal yang berubah tapi yang menarik itu antara lain perubahan beban kerja.

Ketika saya masuk BPK pada 1996, saya ingat sekali dalam setahun itu mendapatkan penugasan dua kali. Sekali penugasan itu sekitar 20 hari kerja. Jadi semester I itu mendapatkan 20 hari tugas. Kemudian, pada semester II kembali mendapatkan 20 hari tugas. Seperti itu saja.

Beban kerja saat itu relatif memang terkonsentrasi di beberapa bulan tertentu dalam setahun. Namun, apabila kita melihat kondisi saat ini, perbedaannya luar biasa. BPK dipercaya oleh masyarakat dan lembaga internasional sehingga beban kerjanya meningkat signifikan.

Setahun itu kalau saya perhatikan, bisa jadi tugas yang harus para auditor itu laksanakan hampir 300 hari dalam setahun. Namun, itu bagus menurut saya karena memang kita diangkat menjadi PNS di BPK untuk bekerja.

Kemudian, dari sisi sumber daya juga sudah berbeda. Saat ini, SDM BPK semakin luar biasa. Dulu SDM BPK sangat sedikit. Saat ini mungkin SDM BPK sudah meningkat tiga kali lipat.

Selain dari sisi kuantitas, kompetensi juga meningkat luar biasa. Dulu itu, lulusan S2 sangat jarang. S1 juga tidak banyak. Sekarang, mencari pegawai dengan latar belakang pendidikan S2 di BPK sudah sangat mudah. Kemudian, lulusan S3 juga semakin banyak.

Animo pegawai BPK untuk meningkatkan pendidikan juga luar biasa tinggi. Sehingga, itu menjadi perbedaan yang signifikan antara dulu dan sekarang.

Dampak hasil pemeriksaan BPK kepada masyarakat juga semakin meningkat. Tentu parameternya banyak, tapi dari pemahaman saya bisa dibilang dulu itu BPK jarang menembus perhatian media massa.

Sekarang, karena manfaat BPK sudah semakin meningkat maka terlihat bagaimana media memuat hasil-hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, BPK juga banyak diminta oleh berbagai lembaga untuk mendorong perbaikan dengan pemeriksaan.

Apa motivasi Bapak untuk bekerja di BPK?

Saya berpikir hal yang sederhana sebenarnya. Ketika saya kuliah di STAN saya diminta untuk mendaftar ke sejumlah kantor pemerintahan. Saya berpikir, yang namanya sesuatu yang tidak benar itu harus dibenarkan.

Latar belakang saya itu lahir dan besar di kalangan pesantren. Saya ingat hadis yang berbunyi, "jika melihat kemungkaran maka perbaikilah dengan kekuasaanmu atau tanganmu. Jika tidak mampu maka dengan mulutmu dan jika tidak mampu lagi maka dengan hatimu." Artinya, kita ini perlu melakukan perbaikan di muka bumi ini.

Ada yang salah kita benarkan. Ada yang bengkok kita luruskan. Itu salah satu prinsip saya dari dulu.

Sehingga, hal itu memotivasi saya untuk memperbaiki sesuatu di dunia ini. Salah satunya yakni dengan melakukan pemeriksaan. Oleh karena itu, saya memilih opsi pertama BPK karena memang menjadi lembaga pemeriksa tertinggi di negara ini. Kemudian, saya memilih BPKP dan selanjutnya adalah Itjen Kemenkeu. Jadi memang semua yang saya pilih bergerak di bidang auditor.

Alhamdulillah saya diterima di BPK. Jadi, ya memang motivasi saya seperti itu. Hidup itu harus dapat memperbaiki apa yang masih belum baik, membenarkan apa yang belum benar, dan meluruskan apa yang belum lurus. Saya juga punya prinsip untuk bisa memberikan manfaat kepada seluruh pihak.

Setelah menjabat sebagai Tortama AKN III BPK, apa target yang Bapak siapkan ke depan?

Saya bersyukur karena AKN III ini sudah cukup established. Saya diwarisi dari para senior Tortama sebelumnya sistem yang bagus sehingga memudahkan saya untuk melangkah ke depan dan didukung dengan pembinaan secara terus menerus oleh Bapak Achsanul Qosasi, Anggota III, yang selalu menekankan profesionalitas, kekompakan, dan humanisme dalam bekerja. Paling tidak, saya berusaha mempertahankan apa yang sudah bagus dan meningkatkan yang bisa ditingkatkan.

Kembali ke prinsip hidup saya tadi, saya berusaha untuk memberikan manfaat kepada sesama. Maka, saya punya *concern* di mana pun saya berada, saya ingin memberikan hasil yang bermanfaat.

Di AKN III BPK, saya berupaya meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Hal ini agar manfaatnya semakin bertambah.

Kalau kita bicara output yang berkualitas maka kita harus bicara input dan proses. Input itu bisa dikatakan sudah given karena kita diberikan antara lain SDM, mesin atau peralatan, dan anggaran. Hal ini harus siap untuk masuk ke dalam proses.

Saya lihat, SDM di AKN III BPK termasuk baik dan saya kira sudah siap. Saya hanya perlu menambah *mentoring* dan *coaching* pengalaman untuk semakin mengasah keterampilan mereka.

Dari sana kemudian baru kita masuk ke dalam proses. Saya dan para kepala auditorat serta kepala subauditorat perlu mengawal proses ini. Kita sudah dibekali dengan berbagai macam metodologi untuk memastikan proses pemeriksaan menjadi benar.



Hidup itu harus dapat memperbaiki apa yang masih belum baik, membenarkan apa yang belum benar, dan meluruskan apa yang belum lurus.

Ada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP), petunjuk pelaksanaan (juklak), dan petunjuk teknis (juknis). Namun, hal ini apabila tidak dikawal berpotensi terjadi pelaksanaan yang melenceng dari panduan. Saya pun sering meminta para kepala auditorat dan kepala subauditorat untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik.

Saya juga meminta para pemeriksa untuk berpikir secara out of the box. Jadi, waktu saya di pesantren ada istilah jumud atau kaku. Saya tidak mau para pemeriksa memiliki pola pikir yang kaku.

Apabila dalam pemeriksaan menemukan masalah atau tantangan mereka tidak berhenti. Justru mereka mencari solusi sehingga bisa menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini akan terefleksi dalam kualitas pemeriksaan supaya sesuai dengan yang diharapkan.

Kepada pihak eksternal, saya juga berkomunikasi dengan para entitas pemeriksaan. Saya minta mereka juga bersinergi dan seirama dengan BPK. Kami berkomitmen memperbaiki pengelolaan keuangan negara ya mereka juga perlu sama-sama mau melakukan itu. Contohnya, di AKN III BPK terdapat beberapa entitas yang mampu mencapai Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) sebesar 100 persen. Tentu hal ini membuat kami senang karena artinya rekomendasi dari BPK dapat diselesaikan oleh entitas dan saya yakin ada manfaat yang bisa dirasakan.

Apa harapan Bapak terhadap BPK ke depan?

Saya berharap, kualitas sumber daya BPK bisa terus meningkat. Seperti sudah saya sampaikan tadi, kita harus terus berubah. Sumber daya yang paling bisa kita kendalikan tentunya adalah SDM. Maka, saya berharap kualitas SDM itu terus meningkat.

Saya juga berharap dampak pemeriksaan BPK itu bisa semakin terukur ke depan. Mungkin ini pekerjaan rumah bersama untuk kita. Tidak hanya dalam pengukuran kuantitatif tapi juga kualitatif. Misalnya, untuk pemeriksaan kinerja yang kita lakukan bagaimana pengukuran dampaknya.

Apa pesan untuk para pegawai BPK?

Kita harus memiliki integritas, independensi, dan profesionalisme. Saya ingin berpesan agar kita jangan hanya terbatas pada integritas dan independensi saja. Kadang teman-teman bekerja dengan lebih menekankan pada kedua hal tersebut tapi lupa pada aspek profesionalisme.

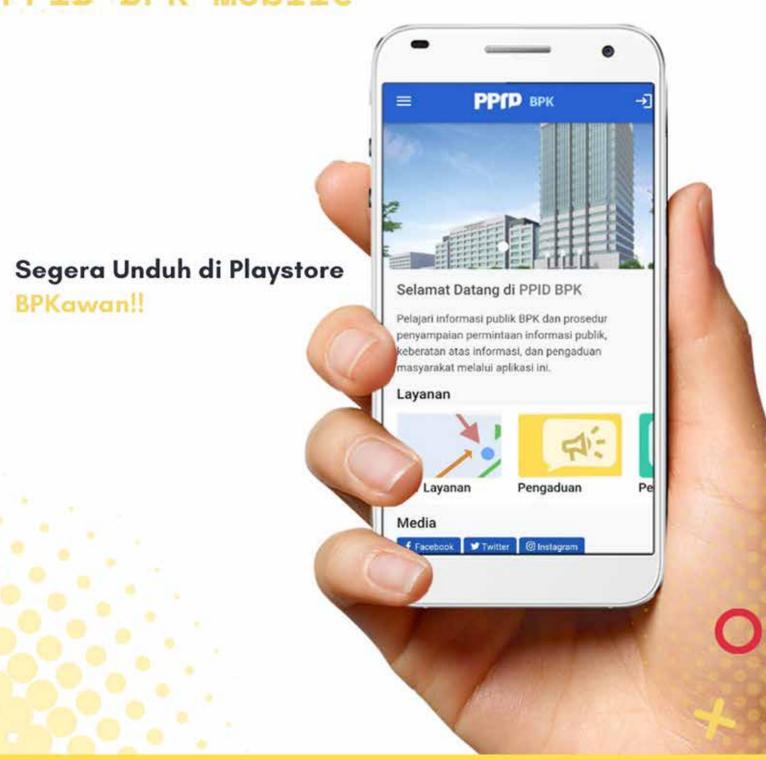
Saya berpesan kepada para pemeriksa BPK bahwa tiga hal ini harus menjadi satu kesatuan dan dikerjakan secara bersama. Tanpa memiliki profesionalisme, maka hasil yang akan kita peroleh tidak akan optimal atau tidak akan berkualitas.

Misalnya, pemeriksaan hanya sekadarnya. Ada tantangan kemudian menyerah. Itu adalah ciri-ciri profesionalisme yang luntur.

Kemudian, saya berpesan kepada teman-teman untuk selalu *happy* bekerja di BPK. Karena kalau kita bekerja tapi tidak bahagia di kantor maka saya yakin hasilnya tidak akan baik. Jadi, saya berpesan untuk selalu *happy* bekerja di BPK. •

Permintaan Informasi & Pengaduan Masyarakat Lebih Mudah Pakai

D BPK Mobile















MUHAMMAD YUSUF ATEH, KEPALA BPKP

MENGAWAL BELANJA PRODUK DALAM NEGERI

residen Joko Widodo terus menegaskan kepada seluruh unsur pemerintah untuk meningkatkan belanja produk dalam negeri. Hal itu pun mendorongnya untuk menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, pihaknya pun mendapatkan instruksi untuk mengawal dan mengawasi realisasi program tersebut. Kepada *Warta Pemeriksa*, Ateh menyampaikan strategi BPKP dalam mengawal program itu dan sejumlah kendala yang harus dihadapinya. Berikut petikan wawancaranya.

66

Negara lain sudah mulai

melindungi produk-

Bagaimana BPKP mengawasi pengelolaan program pemerintah atas peningkatan belanja produk dalam negeri saat ini?

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kita semua mendapatkan tugas untuk melaksanakan pengawasan program ini termasuk efektivitas dan efisiensinya. Kita semua sudah tahu bahwa program Bangga Buatan Indonesia itu sudah lama dilakukan bahkan sejak era presiden sebelum saat ini.

Kenapa ini penting? Saat ini, tengah terjadi krisis pangan dan energi di seluruh dunia. Setelah pandemi Covid-19, ada perang Rusia-Ukraina yang dampaknya luar biasa. Apalagi, Rusia dan Ukraina memiliki peran besar dalam pasokan energi dan komoditas pangan ke seluruh dunia. Sehingga, dampaknya besar sekali.

Dengan adanya pandemi Covid-19 ditambah tantangan tersebut, maka kita perlu menyiapkan langkah-langkah agar kita bisa tetap survive atau bertahan. Ini artinya, selain kita mulai melakukan hilirisasi industri dan meningkatkan produktivitas, hal yang paling penting adalah kita juga menggunakan produksi kita sendiri dari dalam negeri. Negara lain sudah mulai melindungi produk-produk mereka sendiri. Banyak negara yang mulai melarang ekspor untuk komoditas tertentu.



Pada awal 2022, BPS menghitung dan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa terdapat angka impor senilai Rp400 triliun. Apabila produk impor tersebut disubstitusi menjadi produk dalam negeri itu akan menghasilkan tambahan PDB sebesar 1,6-1,7 persen untuk pertumbuhan. Hal itu juga bisa membuka dua juta lapangan kerja baru. Dari sana, Presiden kemudian minta diaktifkan kembali program Bangga Buatan Indonesia ini.

Presiden Jokowi sempat bertanya kepada koordinator program yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, 'Apa bedanya program kali ini dibandingkan program sebelumnya?'

Perbedaannya, sekarang ini kita lakukan secara lebih komprehensif. Artinya, tidak hanya dari sisi demand. Bukan hanya kita meminta kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri tapi tidak meninjau sisi pasarnya atau tempat bertemunya antara supply dan demand. Dalam belanja kementerian/lembaga, pasar itu artinya berupa e-Katalog yang menjadi marketplacenya.

Kemudian, yang dilihat lebih serius adalah sisi supply atau industri yang menghasilkan produk substitusi impor tersebut. Kita hanya menyuruh orang membeli produk dalam negeri tapi barangnya tidak ada. Akhirnya, program itu tidak jalan.

Jadi, pendekatan kali ini lebih komprehensif. Kita lihat dari sisi *supply*, mana saja produsen kita yang bisa menghasilkan produk substitusi impor. Kemudian, siapa nanti yang akan membelinya dari sisi pemerintah. Selain itu, bagaimana cara menemukan antara *supply* dan *demand* ini supaya bertemu di *marketplace*.

Selain itu, perbedaannya adalah program kali ini diawasi secara ketat dan intensif. Setiap langkah itu diawasi secara serius dan lebih ketat dari sebelumnya.

Target pada tahun ini adalah melakukan substitusi produk impor sebesar Rp 400 triliun seperti yang dihitung BPS. Dari sisi demand, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN dikerahkan untuk membeli produk dalam negeri. Kemudian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) kita minta untuk membenahi e-Katalog baik terkait sistem maupun digitalisasinya.

Kemudian, terkait *supply*, Kemenperin diminta untuk mengawasi produksi dari dalam negeri. Misalnya, mendukung proses sertifikasi atau mendorong UMKM untuk bisa menyediakan barang untuk kebutuhan pemerintah. Di situ juga dilaksanakan *business matching*.

Dari upaya-upaya tersebut, diperoleh komitmen untuk menggunakan anggaran untuk produk dalam negeri sebesar Rp830 triliun. Per semester I 2022, komitmen tersebut sudah terealisasi sebesar Rp298,6 triliun dari K/L, pemda, dan BUMN.

Memang angka itu masih jauh dibandingkan komitmen Rp830 triliun. Tapi terus awasi dan dampingi seluruh proses tersebut.

Misalnya, kami menemukan ada produk tertentu yang tertulis sebagai barang lokal padahal itu adalah barang impor. Ini kita awasi semuanya. Kita juga sudah sampaikan ke Presiden Jokowi bahwa ada 823 barang impor yang banyak dibeli tapi sebenarnya ada substitusinya di dalam negeri.

Bagaimana koordinasi BPKP dengan APIP di pusat dan daerah dalam pengelolaan belanja produk dalam negeri?

APIP memiliki peran penting karena tentu BPKP tidak bisa bekerja sendiri. Kami juga sudah kumpulkan APIP K/L, pemda, dan BUMN dalam Rakornas Pengawas Internal dalam rangka penyatuan langkah pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Kami telah membuat aplikasi untuk pengawasan yakni Siswas P3DN. Aplikasi itu membantu APIP dalam melaksanakan pengawasan P3DN di lingkungan yang menjadi kewenangannya. Dengan demikian, para APIP dapat menjaga program ini di instansi masing-masing.

Apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi oleh BPKP dalam mengawasi jalannya kebijakan P3DN?

Pelaksanaan Program P3DN masih dalam tahap awal, sehingga tantangan dalam pengawasan yang muncul antara lain sistem informasi yang mendukung pengawasan pelaksanaan program masih dalam tahap pengembangan. Masih banyak kekurangan dan belum terintegrasi.

Informasi transaksi produk dalam negeri (PDN) dan tingkat kandungan dalam negeri



Dalam jangka panjang, esensi pelaksanaan dari program P3DN ini adalah bagaimana memberikan ruang bagi produsen produk dalam negeri untuk tumbuh dan berkembang serta dapat bersaing dengan produk-produk impor. Dengan demikian, belanja PDN yang dilakukan oleh K/L, pemda, dan BUMN seharusnya untuk barang-barang substitusi impor atau PDN yang mempunyai TKDN lebih dari 40 persen.



bpkp.go.i

(TKDN) juga tidak lengkap tersedia. LKPP hanya memiliki informasi proses pengadaan (e-Tendering dan e-Katalog) sampai dengan penetapan pemenang namun informasi realisasi PDN maupun TKDN serta pembayaran tidak tersedia.

Selain itu, belum ada pedoman atau panduan penghitungan TKDN dari kementerian yang berwenang (Kemenperin) untuk memudahkan pihak terkait dalam melakukan penghitungan TKDN atas produk dalam negeri. Sehingga, perlu ada sistem yang terintegrasi antara penyusunan rencana penganggaran sampai realisasi PDN dan TKDN. Kemenperin juga perlu membuat daftar inventarisasi PDN lengkap dan tidak hanya TKDN.

Kemenperin juga perlu membuat kebijakan untuk peningkatan sertifikasi TKDN dengan berbagai metode dan tidak hanya melalui surveyor independen. Kemenperin juga perlu melakukan identifikasi produk strategis yang perlu dikem-

bangkan, menyusun rencana pengembangan, dan melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan TKDN.

Sinergitas apa yang bisa dikembangkan antara BPKP dan BPK dalam mendukung program P3DN ini?

BPK jelas bisa membantu untuk menghukum dan membuat K/L, pemda, dan BUMN menjadi patuh. Presiden meminta minimal 40 persen harus belanja produk dalam negeri. Masih ada 26 K/L yang komitmennya di bawah itu. BPK juga bisa membantu memeriksa karena memang BPK punya kewenangan untuk itu. BPK juga bisa melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau kinerja untuk mengecek perkembangan industri Tanah Air seperti obat, alat kesehatan, baja, dan tekstil dalam mendukung upaya belanja produk dalam negeri.

Apa harapan bapak terhadap program P3DN?

Nasib bangsa ini ditentukan oleh kita sendiri. Dalam kondisi seperti saat ini, tentu kita harus bersatu untuk membela produk dalam negeri.

Kenapa kita masih bertahan? Karena kita memang negara yang kaya dengan energi dan pangan. Permasalahannya, masih banyak bahan mentah kita kirim ke luar negeri kemudian kita impor kembali dalam bentuk produk setengah matang. Hal ini menjadi momentum kita untuk menggiatkan hilirisasi.

Dalam jangka panjang, esensi pelaksanaan dari program P3DN ini adalah bagaimana memberikan ruang bagi produsen produk dalam negeri untuk tumbuh dan berkembang serta dapat bersaing dengan produk-produk impor. Dengan demikian, belanja PDN yang dilakukan oleh K/L, pemda, dan BUMN seharusnya untuk barang-barang substitusi impor atau PDN yang mempunyai TKDN lebih dari 40 persen. •





■ Rukijo

MENGELOLA MUTASI PEGAWAI KEMENKEU

Kemenkeu masih melakukan kajian terhadap pola kerja dari mana saja atau work from anywhere.

engelolaan mutasi pegawai
telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil yang kemudian direvisi menjadi PP Nomor
17 Tahun 2020. Aturan itu kemudian menjadi panduan secara nasional bagi seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Keuangan Rukijo mengatakan, pada dasarnya, pola mutasi di Kemenkeu sama dengan kementerian lain. Sebuah mutasi atau rotasi pegawai didasarkan kepada kebutuhan organisasi.

"Hal itu tecermin dari kebutuhan masing-masing unit atau jabatan," ujar Rukijo kepada *Warta Pemeriksa*.

Dalam penetapan mutasi, beberapa faktor menjadi pertimbangan antara lain durasi seseorang atau pejabat menempati posisi jabatan tersebut. Apabila dinilai sudah terlalu lama maka perlu dilakukan mutasi agar ada penyegaran.

Mutasi juga dilakukan untuk memastikan

pengisian jabatan-jabatan yang kosong dalam suatu unit kerja. Mutasi bisa dilakukan di level pelaksana eselon IV hingga eselon I termasuk pejabat fungsional.

"Artinya, pada saat beberapa jabatan tadi memerlukan orang yang memiliki keahlian dan pengalaman tertentu maka akan dilakukan mutasi untuk diisi dengan orang yang kompeten," kata Rukijo.

Salah satu alasan mutasi dilakukan adalah peningkatan kualitas SDM. Setiap pegawai dan pejabat itu harus memiliki pengayaan pengalaman, memiliki kompetensi yang semakin meningkat, memberikan inspirasi, dan mendorong suatu perubahan atau inovasi baru. Sehingga, dalam rangka untuk mengadakan pengayaan pengalaman dan kompetensi serta untuk mendorong inovasi atau inisiatif baru yang bisa meningkatkan kinerja unit maka perlu dilakukan mutasi.

Dalam kebijakan mutasi atau rotasi pegawai telah dibuat pedoman untuk memenuhi kebutuhan organisasi dilakukan secara serentak dua kali dalam setahun. Namun, ujarnya tidak berarti semua unit harus melakukannya dua kali dalam setahun.

"Hal itu tergantung kebutuhannya," ungkap Rukijo.

Sebelum dilakukan mutasi juga dilakukan pemetaan menyeluruh terhadap kebutuhan jabatan yang perlu diisi. Hal itu juga berlaku untuk unit di pusat maupun vertikal atau di daerah.

Rukijo mengatakan, berdasarkan aturan, mutasi bisa dilakukan minimal dua tahun dan maksimal lima tahun menjabat. Sehingga, apabila seorang pegawai sudah masuk dalam rentang itu bisa dilaksanakan mutasi.

Meski begitu, dia menjelaskan, bukan berarti semua pejabat yang sudah ada dalam rentang waktu itu dimutasi sekaligus. Mutasi dapat dilaksanakan dalam beberapa periode sehingga tidak mengganggu pola kerja dan kesinambungan mekanisme kerja.

"Selain itu, mutasi pegawai juga membutuhkan adaptasi sehingga butuh waktu untuk tune in," ujarnya.

Secara umum, ujar Rukijo, tidak ada pengecualian terhadap pegawai untuk dimutasi. Akan tetapi, ada beberapa jabatan atau pekerjaan tertentu yang memang tidak bisa ditinggalkan oleh pejabat lama karena masih dalam proses finalisasi atau penyelesaian. Misalnya, terkait menyelesaikan rancangan undang-undang (RUU).

"Kalau dia sudah menyusun RUU 75 persen, kalau nanti diisi orang baru maka sisanya berpotensi terkendala. Maka pekerjaan itu bisa dituntaskan terlebih dahulu baru kemudian dilaksanakan mutasi," kata Rukijo.

Ada juga jenis pekerjaan tertentu

nakan secara serentak. Misalnya, pengembangan TI atau sistem aplikasi. Ada beberapa jenis pekerjaan yang memerlukan spesialisasi tertentu dari seorang pegawai dan yang punya spesialisasi itu masih terbatas. Untuk hal itu, pola mutasi tidak dilakukan seperti reguler.

"Untuk hal seperti ini, jumlahnya tidak banyak. Ini bukan bentuk pengecualian tapi penyesuaian dengan kebutuhan organisasi," ujarnya.

Seperti halnya BPK, Kemenkeu juga merupakan organisasi pemerintahan yang besar dengan kantor pusat di Jakarta dan memiliki kantor atau unit kerja di daerah. Dalam praktiknya, beberapa jabatan setara pun ada di pusat dan daerah. Contohnya, pejabat eselon II ada di kantor pusat dan ada pula di daerah.

Dengan hal itu, pola mutasi pun bisa dilakukan dari pusat ke daerah dan dari daerah ke pusat. Proses perpindahan dari suatu lokasi ke lokasi lain diberikan semacam transisi untuk persiapan. Hal ini karena pegawai juga perlu mempersiapkan sejumlah hal seperti mempersiapkan pemindahan anggota keluarga.

"Ada juga masa pembekalan supaya dia bisa lebih cepat tune in," ujarnya.

Selain itu, mutasi juga diupayakan dilakukan pada masa tahun ajaran baru atau libur sekolah. Ini karena proses mutasi tidak



hanya mempertimbangkan kebutuhan unit tapi juga aspek keluarga pegawai.

Memetakan WFA

Rukijo mengatakan, saat ini Kemenkeu masih terus melakukan kajian terhadap pola kerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA). Menurutnya, untuk bisa memetakan atau menerapkan sistem kerja tersebut perlu dipetakan jenis pekerjaan yang bisa dilakukan secara WFA.

"Tidak semua pekerjaan itu bisa dikerjakan dari mana saja," ujarnya.

Rukijo menjelaskan, ada pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah atau dari tempat lain dan tidak perlu di kantor. Hal itu, misalnya, membuat modul aplikasi, analisis data, atau menyusun rekomendasi kebijakan.

Ada pula pekerjaan yang memang menuntut dilakukan di kantor karena kantor menjadi tempat pelayanan. Untuk pekerjaan yang harus dilakukan di kantor karena kantor itu merupakan unit layanan maka tidak bisa menerapkan WFA.

"Karena kalau melayani maka pegawai bersangkutan harus ada di kantor," ujarnya.

Menurut Rukijo, hal ini menjadi prinsip mendasar dalam penerapan WFA. Sehingga, memang perlu dipetakan dan diidentifikasi secara matang.

WFA atau bekerja dari mana saja itu juga butuh infrastruktur atau sarana pendukung. Dalam sebuah proses analisis data, contohnya, harus difasilitasi dengan suatu sistem untuk mendukung proses pertukaran data secara aman. Kemudian, pada saat pegawai harus membuat analisis atau rekomendasi diperlukan dukungan sistem elektronik yang mendukung hal tersebut.

Dia mengatakan, saat ini Kemenkeu telah menggunakan e-office. Menurutnya, terobosan itu ke depannya juga akan semakin didigitalisasi. Semua proses dilakukan secara digital, baik dokumentasi hingga penetapan pekerjaan.

Rukijo menekankan, infrastruktur atau kesiapan TI memang penting untuk mendukung WFA. Selain itu, dibutuhkan kesiapan SDM untuk bisa mengoperasikan sistem kerja lewat skema digital tersebut.

Kemenkeu merasakan, dengan adanya pandemi Covid-19 telah mendorong percepatan penerapan kerja dari mana saja.



Dalam penerapannya, kami berhati-hati dan secara bertahap supaya ini tidak mengganggu proses bisnis dan juga target yang berkaitan dengan kinerja.

Penggunaan TI sudah semakin masif di dalam berbagai jenis pekerjaan.

Dengan adanya e-office dan kondisi pandemi, pegawai Kemenkeu pun sudah menjalankan pola kerja dari rumah. Meski begitu, menurut Rukijo, penetapan WFA memerlukan suatu sistem yang lebih lengkap dan diperlukan juga pedoman penerapan WFA agar tidak melanggar aturan.

"Dalam penerapannya, kami berhati-hati dan secara bertahap supaya ini tidak mengganggu proses bisnis dan juga target yang berkaitan dengan kinerja," ujarnya.

Kemenkeu saat ini juga tengah mengembangkan satellite office di daerah yang memungkinkan pegawai bisa bekerja dari tempat tersebut. Pegawai itu akan terkoneksi dengan unit kerjanya sehingga dia bisa bekerja dan terpantau bahwa dia itu bekerja.

Dari kemajuan TI dan dari sisi substansi pekerjaannya memang itu memungkinkan untuk diterapkan. Kemenkeu menyiapkan skema dengan berbekal dari penerapan WFH selama ini. Rukijo juga berharap dari sisi nasional akan ada pedoman untuk penerapan WFA ini lebih lanjut.

Rukijo menilai, penerapan WFA akan banyak memberikan manfaat bagi pegawai maupun organisasi sehingga sangat mungkin untuk diterapkan. Dari pengalaman menerapkan bekerja dari rumah selama pandemi, banyak penghematan sumber daya. Misalnya, tidak perlu banyak mencetak dokumen, penghematan kertas, penggunaan listrik, dan penggunaan ruang.

"Sehingga, belanja operasional pemerintahan bisa lebih efisien. Ini arah yang baik untuk dikembangkan ke depan," ujarnya. •

CERITA SUKSES TELKOM MENERAPKAN POLA KERJA FLEKSIBEL

Saat ini, Telkom menerapkan model penilaian kinerja berdasarkan OKR (*objective & key result*) dan dimonitor per triwulan dengan menggunakan *tools* performansi.

enjadi bagian dari industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK), PT Telkom Indonesia Tbk (Telkom) menerapkan pola kerja fleksibel. Dengan pola kerja ini, karyawan diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan layanan, produk, serta produktivitas/kinerja.

"Pola kerja yang diterapkan di Telkom saat ini disebut dengan pola kerja Flexible Working Arrangement (FWA) atau cara bekerja yang memberikan tingkat fleksibilitas tertentu kepada karyawan (waktu dan lokasi)," kata Direktur Human Capital Management Telkom Afriwandi kepada Warta Pemeriksa, belum lama ini.

Dia menjelaskan, pola kerja ini termasuk dalam salah satu Strategi Inisiatif Telkom terkait dengan *digital ways of working*. Tujuannya untuk mendukung transformasi yang sedang dilakukan di internal perusahaan.

Menurut Afriwandi, sesaat sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Telkom telah mulai dengan pilot project FWA di beberapa unit. Dengan adanya pandemi, pola kerja ini pun menjadi semakin cepat diimplementasikan di seluruh grup. Apalagi ketika pandemi fokus utama perusahaan adalah keselamatan karyawan.

Karenanya, Telkom mengikuti arahan pemerintah pusat dan daerah setempat terhadap kebijakan jumlah karyawan yang dapat melaksanakan work from office (WFO). Sebagai salah satu industri vital, Telkom mendapatkan izin untuk tetap menjalankan operasionalnya.

Afriwandi menjelaskan, pola kerja FWA dapat diterapkan dengan tiga model, yaitu full work from office (WFO), full work from home (WFH), dan hybrid (kombinasi WFO dan WFH). Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan unit dan ditentukan oleh masing-masing kepala unit yang paling mengetahui kebutuhan unitnya.

"Pola kerja ini merupakan pola kerja yang baru, khususnya dengan adanya kegiatan WFH yang sebelum pandemi belum pernah dilakukan secara terencana," kata dia.

Mengenai pola kerja work from anywhere (WFA) yang juga sedang berkembang, dia menilai, yang menjadi fokus pertama perusahaan adalah keselamatan karyawan dan produktivitas

kerja. Sejauh situasi pandemi sudah kondusif dan terkendali, pelaksanaan WFA sangat memungkinkan dilaksanakan.

> Tentunya dengan tetap memperhatikan kebijakan perusahaan terhadap remunerasi karyawan yang salah satu

> > komponennya adalah berdasarkan lokasi kerja. Sehingga ketika pandemi sudah terkendali, WFA ini dapat dilaksanakan sesuai dengan lokasi kerja dan

kebutuhan unit serta karakteristik pekerjaan dari karyawan.
Dia menjelaskan, keuntung-

an pola kerja FWA dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi perusahaan dan karyawan. Dari sisi perusahaan, produktivitas seluruh karyawan dapat tetap dijaga karena pekerjaan dapat dilakukan secara fleksibel. Terutama dengan dukungan tools digital. Selain itu, terdapat potensi efisiensi atas berkurangnya biaya untuk pertemuan fisik, seperti rapat, perjalanan dinas, dan training.

Bagi karyawan, lanjutnya, terdapat penghematan waktu dan biaya perjalanan ke dan dari tempat kerja. Terutama bagi karyawan yang tinggal di kota besar, seperti Jakarta.



Selain itu adanya FWA juga memberikan kesempatan bagi karyawan untuk meningkatkan well being. Ini antara lain dengan menjaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan rumahan dan berolahraga.

elapan dimensi yang menjadi syarat agar FWA dapat berjalan dengan baik yang sudah disiapkan di Telkom:

>>>>>

"Kerugian dari cara kerja FWA dapat dikatakan hampir tidak ada. Terutama dengan mengombinasikan antara WFO dan WFH atau *hybrid*. Ketika ada kebutuhan unit atau karakteristik pekerjaan menuntut untuk dikerjakan secara fisik, maka tingkat WFO dapat disesuaikan menjadi lebih banyak daripada WFH. Demikian pula sebaliknya," tambah Afriwandi.

Meskipun begitu, perusahaan tetap mengantisipasi kerugian FWA dengan mengatur pola kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan unit dan karakteristik pekerjaan. Selain itu setiap pengberperan dalam perubahan mindset dan leadership ajuan model FWA (kepemimpinan) dengan dari karyawan (role modeling). bukan hanya atas keingin-Adanya an pribadi. dukungan berupa coaching, Akan tetacounseling, dan layanan pi harus kesehatan yang dapat diakses mendapat setiap saat. persetujuan dari atasannya lang-Tersedianya technology sung. infrastructure yang Sememungkinkan pelaksanaan working arrangement mentara dengan memperhatikan mengenai cvber security. peng-Tersediaawasan, solution yang me-Afriwandi menunjang monitoring pelaksanaan working nekankan baharrangement, keamanan wa Telkom telah data perusahaan, dan fasilitas kerja yang memudahkan pemenyediakan tools laksanaan kerja melalui untuk me-monitor produktivitas dan performansi karyawan yang terus dikembangkan sesuai kebutuhan. Hal ini sejalan dengan karakter Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi yang sedang bertransformasi menjadi digital telecommunication company.

Sebelum pandemi, kata dia, performansi individu

karyawan diukur dengan metode key performance indicator (KPI) secara periodik dengan masa penilaian setahun sekali. Adanya purposes and Metode pengukurprinciples pelaksanaan working arrangement an performansi yang jelas. ini selanjutnya disesuaikan dengan trans-Adanya policy terkait FWA dan formasi perperformance manageusahaan ment system yang men-dukung pelaksanaan sistem dan perkerja secara formal. ubahan cara bekerja yang Adanya model kerja yang disesuaikan dengan kebuditerapkan di Telkom, tuhan perusahaan dan karakteristik perusahaan, tervaitu FWA. diri dari working from office (WFO), working from Saat ini, home (WFH), dan kombinasi ke-Telkom meduanya nerapkan mo-(hybrid). del penilaian kinerja berdasarkan OKR (objecnew ways of working tive & key result) dan dimonitor per triwulan dengan menggunakan tools performansi. Dalam perkembangannya, tools yang ada dilengkapi fungsinya sehingga dapat memberikan informasi lainnya.

Misalnya saja presensi karyawan, mulai dari pencatatan lokasi karyawan saat bekerja hingga pola kerja apa yang diambil selama pekan berjalan (full WFH atau full WFO atau hibrida). Termasuk tugas-tugas apa yang dilakukan karyawan per hari dan bagaimana tugas tersebut dikaitkan dengan pencapaian target unit.

Menurut dia, sejauh ini, pola kerja FWA terbukti cukup efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan tetap terjaganya kinerja Telkom selama pandemi. Bahkan mengalami peningkatan karena adanya peningkatan kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan Telkom selama pandemi, seperti kebutuhan internet untuk bekerja dan belajar dari rumah.

"Setelah pandemi usai, Telkom bertekad untuk melanjutkan cara kerja secara FWA dengan mayoritas memanfaatkan pola kerja secara hybrid. Ini dilakukan terutama sejalan dengan Employer Value Proposition (EVP) Telkom yang dipromosikan untuk mendapatkan digital talent terbaik, yang salah satunya adalah dapat melakukan pekerjaan secara fleksibel," papar dia.

HARMONI SENJA,

AJANG MUSIK PEMERSATU INSAN BPK NTB

Harmoni Senja melepas kecanggungan antara teman-teman yang baru masuk dengan senior di BPK.

musik. Apalagi, di BPK PWK NTB telah memiliki beragam alat musik seusai melakukan pengadaan pada 2021.

Kesempatan pun muncul bagi sebagian karyawan untuk unjuk gigi memperlihatkan kemampuannya. Kesempatan itu ada ketika harus menjadi band pengiring pada acara serah terima

> jabatan Kepala Perwakilan NTB sebelumnya, Hery Purwanto kepada yang baru yaitu Ade Iwan Rusmana. "Waktu itu awalnya hanya untuk mengisi acara pak Heri Purwanto. Alat-alatnya juga waktu pertama itu hanya gitarnya Pak Wisnu, terus pemain-pemainnya juga sudah banyak yang pindah. Lama-kelamaan banyak teman yang baru masuk, dan memiliki minat musik yang sama," tutur Yani kepada

Warta Pemeriksa.

Dari awalnya yang hanya sekadar mengisi acara, kemudian terbentuklah tiga band yang menjadi cikal bakal acara Harmoni Senja. Band tersebut antara lain, GnG, Renno and Friends, dan Sugar Daddy.



ermusik menjadi salah satu sarana pemersatu karyawan BPK Perwakilan Nusa
Tenggara Barat (NTB). Lewat musik, karyawan yang telah bertahun-tahun membaca lembar demi lembar laporan keuangan, bisa duduk bareng dengan kawan yang baru saja di inaugurasi menjadi insan BPK.

Mereka atas nama musik, bersatu dalam bentuk band yang bermain di acara bertajuk Harmoni Senja. Lalu, bagaimana awal mula terbentuknya komunitas musik di NTB? Menurut Kepala Subbagian Keuangan BPK Perwakilan NTB Widodo Setio Pamuji, semua berawal dari kecintaan sebagian pegawai dengan musik. Tidak hanya mencintai musik, sebagian pegawai BPK NTB ternyata juga mahir memainkan alat



GnG atau Girl and Giants adalah kelompok yang terdiri atas lima orang, yaitu Ditha Sakinah Putri (vokalis), Oemar Prawirosadi (vokalis), Paramitha Rahma (drummer), Novia Rahmadanti (pemain bass), dan Handriany Erlianingsih (gitaris). "Ada kata 'Giants; itu karena kebetulan satu-satunya anggota cowok di band bertubuh besar," ungkap dia.

Sementara, Sugar Daddy berisi karyawan yang statusnya sudah bapak-bapak alias karyawan senior. Mereka adalah Kadek yang mengisi drum and vokal, Leo (gitar), Zulfikar (gitar), Ryan (vokal), dan Rommy (bass). Sedangkan band lainnya justru berisikan karyawan BPK yang berstatus anak baru. Mereka antara lain, Hasmad Setyadi mengisi drum, Veronika Pebriani Sihaloho (vokal), Gean (gitar/backing vokal), Renno (gitar), Dadex (bass), Awan (vokal), Farah (vokal), dan Yudha mengisi vokal serta rap.

Sementara itu, menurut Ditha Sakinah Putri yang merupakan anggota grup GnG, kelahiran jamming session Harmoni Senja tak lepas dari dorongan

Widodo Setio Pamuji. Ditha menceritakan, saat itu ada kesamaan pandangan bahwa semangat kebersamaan tidak akan terbentuk jika bermusik sekadar mengisi waktu luang. Apalagi, setiap sore ruangan bermain band selalu ramai. Sehingga, menurut Ditha, perlu sebuah event yang bisa menyemarakkan dan mempersatukan insan BPK Perwakilan NTB.

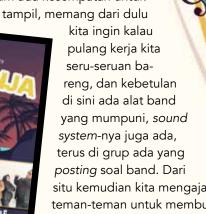
Mulai dari situlah tercetuslah acara Harmoni Senja. "Ya itu awalnya karena sudah delapan bulan teman-teman di sini belum ada kesempatan untuk

> kita ingin kalau pulang kerja kita seru-seruan bareng, dan kebetulan di sini ada alat band yang mumpuni, sound system-nya juga ada, terus di grup ada yang posting soal band. Dari situ kemudian kita mengajak teman-teman untuk membuat acara Harmoni Senja," katanya.

Nama Harmoni Senja sendiri lahir karena memang acara digelar saat senja alias pulang kerja. Penampilan Harmoni Senja

rencananya akan dilaksanakan secara rutin dua kali dalam setahun, sebagai bentuk komitmen dan keseriusan bersama. Ketika Harmoni Senja digelar pun tidak hanya menampilkan tiga band, namun juga ada duo bahkan solo. Bahkan menurut salah satu penampil dalam Renno and Friends, Veronika Pebriani Sihaloho, acaranya benar-benar "pecah".

Dia menilai, para peserta maupun penonton benar-benar larut dalam acara. Harmoni Senja, menurut dia, seperti melepas kecanggungan antara teman-teman yang baru masuk dengan senior di BPK. "Sehingga menjadi sarana saling menyatukan." •



KLINIK PRATAMA BPK NTT JADI UJUNG TOMBAK KESEHATAN SELAMA PANDEMI

Klinik Pratama BPK NTT memiliki layanan rutin dan layanan khusus.

eperti kantor perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan lainnya, Kantor Perwakilan BPK Nusa Tenggara Timur juga memiliki layanan kesehatan. Bahkan, klinik pratama yang ada di area kantor ini tidak hanya menjadi layanan kesehatan bagi pegawai, namun juga keluarga pegawai.

"Semua karyawan kita maupun yang kontrak, sebelum berobat ke tempat lain pasti ke sini. Jadi kalau sakit, ya awalnya dirujuk ke sini terlebih dahulu. Dokter kita itu kebetulan dokter yang aktif, sering diundang penyuluhan eksternal, dokter kita bagus, mumpuni menurut kawan-kawan. Jadi kawan-kawan daripada ke dokter luar, lebih baik ke klinik di BPK NTT," ucap Kepala Perwakilan BPK NTT Adi Sudibyo kepada *Warta Pemeriksa*, akhir Juli.

Adi menambahkan Klinik Pratama BPK NTT memiliki satu dokter umum dan perawat. Pelayanan kesehatan tersebut didukung peralatan pengecekan kesehatan yang biasa digunakan secara rutin dan umum seperti layanan kesehatan lainnya. Beberapa alat kesehatan itu seperti mesin sterilisasi alat-alat medis, nebulizer, tabung oksigen, pengukur tekanan darah, pengukur tinggi badan, pengukur berat badan, dan alat tes cepat (gula darah, kolestrol, asam urat, trigliserida).

"Klinik Pratama BPK merupakan klinik pra-





■ Adi Sudibyo

tama, sehingga penanganan yang diberikan adalah penanganan dasar yang meliputi peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan juga pemulihan kesehatan," ungkap Adi.

Klinik Pratama BPK NTT memiliki layanan rutin dan layanan khusus. Layanan rutin adalah pemeriksaan kesehatan dimana apabila ada pegawai yang sedang sakit dapat langsung datang ke klinik untuk diperiksa oleh dokter di jam kerja.

Para pegawai juga dapat memeriksakan kondisi kesehatannya melalui pemeriksaan tekanan darah, kolestrol, asam urat dan gula darah, serta pemantauan kesehatan bagi pegawai yang yang sedang pengobatan rutin yang membutuhkan pemantauan lebih lanjut oleh dokter dan perawat, seperti hipertensi dan diabetes.

Setiap sepekan sekali, dokter dan perawat juga mendatangi pejabat struktural di masing-masing ruang kerjanya untuk cek tekanan darah (tensi) dan keluhan-keluhan akibat penyakit yang lainnya.

"Jadi kehadirannya penting, karena pelayanan kesehatan ini *kan* penanganan pertama, penanganan awal kalau teman-teman ada keluhan. Nanti kalau ternyata penyakitnya serius dan memerlukan perawatan baru dirujuk ke rumah sakit. Kita juga sudah menyediakan obat-obatan yang lengkap," ungkap Adi.

Apalagi selama masa pandemi, kehadiran Klinik Pratama amat penting. Meski di masa pandemi pegawai melakukan kerja dari rumah atau WFH, klinik tetap aktif sesuai jam kerja.

Karena Klinik Pratama juga melayani pemeriksaan swab rapid antigen bagi seluruh pegawai, terutama yang baru datang dari luar kota atau kembali dari penugasan maupun untuk kepentingan tracing.

Hasil dari pemeriksaan *swab* antigen telah terkoneksi dengan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga apabila ada pegawai yang positif Covid-19 dapat langsung dilaporkan lewat aplikasi Peduli Lindungi.

"Klinik Pratama juga melakukan layanan khusus atau layanan yang diberikan di mana ada kejadian di luar jam kerja yang membutuhkan dokter atau perawat untuk datang memeriksa/mendampingi seperti sakit atau kecelakaan diluar jam kerja," papar dia.

Pentingnya Klinik Pratama

Adi menceritakan, sedari awal maksud dan tujuan dari pelayanan kesehatan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi NTT adalah agar para pegawai bisa mendapatkan pelayanan medis dengan cepat, ditangani oleh dokter dan perawat profesional secara rutin, serta dapat mendeteksi secara dini gangguan kesehatan para pegawai dengan memberikan alternatif-alternatif penanganan/pencegahan.

Selain itu, untuk mempermudah akses mendapatkan obat-obatan dalam kondisi darurat ringan, pertolongan pada suatu kondisi medis/kecelakaan di area perkantoran, sebagai *check point* informasi kesehatan, dan upaya pencegahan penyakit serta penyuluhan kesehatan sehingga produktivitas para pegawai dapat terpelihara.

Dalam sehari, ungkap dia, Klinik Pratama bisa melayani 25 orang pegawai, dengan keluhan umum, hipertensi, batuk, pilek, demam, dermatitis alergi, dispepsia, asam urat, kolestrol, dan gula darah.

"Apabila ada keluhan dari pasien yang tidak dapat ditangani klinik, maka akan dirujuk ke layanan kesehatan yang lebih lengkap seperti Rumah Sakit," tutur dia.

Makanya, ucap Adi, Klinik Pratama BPK Perwakilan NTT telah menjalin kerja sama dengan beberapa instansi, antara lain, Prodia, Badan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT (BDLHK) dan Dinas Kesehatan Kota Kupang.

"Untuk Prodia sendiri kerja sama yang terjalin adalah dalam bentuk kerja sama untuk pelaksanaan Medical Check Up (MCU) untuk para pe-





gawai yang berhak mendapatkan layanan MCU (pejabat struktural dan Pemeriksa Madya) yang dilaksanakan tiap tahun."

Sementara kerja sama dengan BDLHK terkait dengan pengelolaan limbah medis yang dihasilkan dari layanan kesehatan pada Klinik Pratama. Sedangkan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Kupang adalah dalam rangka *tracing* dan pencegahan penularan Covid-19 dengan pemberian akses/link pada aplikasi Peduli Lindungi agar Klinik Pratama BPK Prov NTT dapat langsung menginput hasil pemeriksaan swab rapid antigen.

Dengan adanya klinik di dalam lingkungan kantor diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan seluruh pegawai, sehingga produktivitas pegawai dalam bekerja jauh lebih baik dan terpelihara. Diharapkan di masa mendatang ada peningkatan dari fasilitas/layanan klinik, seperti adanya poli gigi dan dokter spesialis lainnya, sehingga memudahkan para pegawai mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik. •

BPK PERTAJAM STRATEGI PEMERIKSAAN

Ketua BPK berpesan agar penyusunan rencana kegiatan dan anggaran mempertimbangkan isu-isu teraktual.

adan Pemeriksa Keuangan (BPK) mempertajam strategi serta rencana pemeriksaan. Penguatan tersebut penting dilakukan pemeriksaan yang dihasilkan BPK semakin berkualitas.

Arahan itu menjadi salah satu poin utama yang disampaikan para pimpinan BPK dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksana BPK Tahun 2022 di Kantor Pusat BPK, Jakarta, pada awal Juli. Rakor kali ini mengambil tema "Sinergi dan kolaborasi mengawal implementasi strategi untuk BPK tangguh dan terpercaya."

Ketua BPK Isma Yatun saat membuka rakor berpesan agar anggaran tahun 2023 dan prognosa 2024 disusun sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya anggaran tambahan (*incremental*) yang disusun berdasarkan anggaran sebelumnya. Hal yang tak kalah penting, tegas Ketua BPK, rencana kegiatan dan anggaran harus mempertimbangkan kondisi terkini.

"Selain itu, rencana kegiatan dan anggaran harus mempertimbangkan isu-isu teraktual yang berkembang dan dihadapi satuan kerja pelaksana BPK," kata Ketua BPK.



■ Isma Yatun



■ Agus Joko Pramono





Kembali saya tegaskan agar sinergi, koordinasi, dan kolaborasi yang telah dibangun selama ini terus ditumbuh-kembangkan untuk menegakkan nilai-nilai dasar dan mencapai visi serta target Renstra BPK 2020-2024.



Ketua BPK dalam kesempatan tersebut juga berharap agar satker di BPK dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi, sesuai dengan tema rakor kali ini. Menurut Ketua BPK, tema rakor sejalan dengan kondisi saat ini yang membutuhkan sinergi serta kolaborasi untuk menghadapi tantangan.

Melalui sinergi dan kolaborasi antar satker, Ketua BPK meyakini arah kebijakan dan strategi dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 dapat diimplementasikan dan dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

"Kembali saya tegaskan agar sinergi, koordinasi, dan kolaborasi yang telah dibangun selama ini terus ditumbuh-kembangkan untuk menegakkan nilai-nilai dasar dan mencapai visi serta target Renstra BPK 2020-2024," ujar Ketua BPK.

Sementara itu, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono dalam pengarahannya menyampaikan enam strategi yang perlu diperhatikan para pelaksana BPK demi pencapaian Renstra BPK 2020-2024. Strategi pertama adalah meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua BPK menyebut ada sejumlah permasalahan yang perlu segera ditindaklanjuti. Salah satu permasalahan itu, antara lain, sampai saat ini masih terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak ditindaklanjuti oleh entitas.

"Atas permasalahan ini perlu dipertimbangkan sanksi administrasi dan sanksi yang diperlukan atas denda dan kewajiban pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan tanpa alasan yang sah," kata Wakil Ketua BPK. Untuk mendorong tingkat tindak lanjut rekomendasi, perlu juga diterapkan mekanisme pelaporan BPK kepada instansi yang berwenang, yaitu Kepolisian RI, sesuai Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017.

Strategi kedua yang disampaikan Wakil Ketua BPK adalah mengenai peningkatan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua BPK menyinggung soal penyampaian informasi rahasia hasil pemeriksaan. Para pelaksana BPK diminta menyusun prosedur khusus dalam penyampaian LHP dan/atau temuan pemeriksaan yang bersifat rahasia kepada DPR. Kemudian, membatasi penyampaian hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia hanya kepada pimpinan K/L terkait dan Presiden.

Selain itu, Wakil Ketua mengarahkan agar ada pengembangan kriteria untuk menentukan informasi yang dikategorikan sebagai informasi rahasia. "Juga, kertas kerja pemeriksaan terkait temuan atau LHP yang mengandung informasi rahasia, tidak diunggah dalam aplikasi SiAP maupun portal BPK," ujar Ketua BPK.



■ Nyoman Adhi Suryadnyana



■ Achsanul Qosasi

Wakil Ketua BPK turut menekankan pentingnya responsivitas BPK dalam memeriksa isu-isu terkini yang strategis dan menjadi perhatian publik. Hal itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan hasil analisis Biro Humas atas perkembangan isu-isu terkini dalam menentukan topik pemeriksaan.

Strategi ketiga, yaitu meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara. Beberapa hal yang wajib diperhatikan terkait hal tersebut adalah konsistensi penerapan metode audit, penguatan *quality assurance* (cold review dan hot review) dalam pemeriksaan.

Strategi selanjutnya yang menjadi penekanan adalah mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara. Adapun strategi kelima, BPK harus melakukan penguatan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.

Salah satu hal yang wajib diperhatikan adalah pemantauan atas kasus kerugian yang ditetapkan oleh pengadilan. Satker ditugaskan untuk melakukan pemantauan kerugian negara berdasarkan putusan pengadilan, Kemudian, di antara LHP reguler, LHP investigasi, dan putusan pengadilan, harus ditentukan nilai kerugian negara yang mana



■ Daniel Lumban Tobing

yang harus dipantau oleh BPK. Sedangkan strategi keenam, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Rakor Pelaksana BPK Tahun 2022 yang digelar secara hibrida, diselenggarakan selama dua hari, yaitu pada 7-8 Juli 2022. Dalam rakor ini, para Anggota BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I-VII turut memberikan pengarahan atas isu aktual strategis. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian penghargaan satker pengelola kinerja, risiko, dan pengetahuan terbaik tahun 2021 dan unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2021, serta penandatanganan pakta integritas penegakan kode etik dan nilai dasar.



■ Haerul Saleh



■ Hendra Susanto

Syarat Isolasi Mandiri (Isoman)

Jika pasien Covid-19:

Tidak bergejala atau bergejala ringan.

Dinyatakan oleh tenaga medis dapat melakukan isoman.



Persiapan isoman

Siapkan kamar, alat makan, dan kamar mandi terpisah dengan anggota keluarga yang negatif Covid-19. Siapkan termometer dan oksimeter (pulse oxymetry) untuk memantau suhu, saturasi oksigen serta frekuensi nadi.

Siapkan obat-obatan dan vitamin untuk menunjang daya tahan tubuh.

HATI-HATI! ASN HARUS PATUHI NETIKET DAN ATURAN BERMEDSOS



OLEH FITRI YULIANTRI P.
 PRANATA HUMAS MUDA BPK

Melimpah-ruahnya informasi yang bersumber dari medsos seringkali diikuti kegagalan penggunanya dalam membedakan antara fiksi dan fakta.

arganet atau warga pengguna internet di tanah air langsung bereaksi atas ancaman pemblokiran oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) terhadap WhatsApp (WA), Instagram (IG), Facebook (FB), dan platform digital lainnya jika tidak mendaftarkan sebagai perusahaan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) paling lambat 20 Juli 2022.

Rencana pemblokiran terhadap media sosial (medsos) yang sangat dekat dengan aktivitas masyarakat di tanah air tersebut langsung mendapatkan reaksi negatif. Berbagai kritik dilontarkan kepada pemerintah, mulai dari dasar aturan yang dinilai masih bermasalah, hingga kesiapan untuk menyediakan pengganti jika platform tersebut benar diblokir.

Ketergantungan komunikasi manusia modern dengan medsos dan aplikasi pengirim pesan pada saat ini sudah menjadi semacam "kebutuhan dasar". Tidak hanya sebatas bersosialisasi, urusan bisnis dan pekerjaan formal pun banyak memanfaatkan platform ini.

Sebagai gambaran, saat ini pertumbuhan pengguna internet di Indonesia terus meningkat. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat, tahun 2022 pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 210 juta, bertambah sekitar 35 juta dibandingkan sebelum pandemi yang berkisar 175 juta pengguna.

Khusus untuk pengguna medsos, dalam laporan *Digital 2022: Indonesian Digital Report 2022*, dari total 277,7 juta penduduk di Indonesia, sebanyak 191,4 juta di antaranya adalah pengguna aktif medsos.²

Mengapa Manusia Menggunakan Medsos

Di dalam medsos, orang dapat membagikan informasi, mengekspose kehidupan pribadinya, serta berinteraksi dengan orang lain baik melalui komentar maupun memberikan dukungan dengan simbol suka (like).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Melalui media sosial para penggunanya dapat membuat dan berbagi konten (informasi, opini, dan minat) dalam bentuk yang beragam (informatif, edukatif, kritik, dll) kepada khalayak yang lebih banyak.

Beberapa karakteristik dari medsos adalah platform yang berbasis pengguna, interaktif, pengguna adalah pembuat konten, pengguna bebas menentukan sendiri pengaturan akunnya, bergantung pada hubungan antar pengguna hingga komunitas yang terbentuk, memberikan

¹ Data Terbaru! Berapa Pengguna Internet Indonesia 2022? https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220609153306-37-345740/data-terbaru-berapa-pengguna-internet-indonesia-2022

² Digital 2022: Indonesian Digital Report 2022 https:andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/

peluang koneksi yang nyaris tak terbatas, dan merupakan bentuk collaborative projects.³

Dari karakteristik medsos tersebut, terdapat dampak negatif yang perlu menjadi perhatian penggunanya. Sebab, melimpah-ruahnya informasi yang bersumber dari medsos seringkali diikuti kegagalan penggunanya dalam membedakan antara fiksi dan fakta.

Dampak negatif ini membuat banyak pengguna medsos terjebak dalam *clicking monkey*, yakni mereka yang hobi menyebarkan hoaks tanpa membaca isinya terlebih dahulu.

Istilah ini pertama kali dipakai dan dikenalkan oleh Pemimpin Redaksi *Tempo.co*, Daru Priyambodo, pada 2013 melalui artikel dengan judul "*The Clicking Monkeys*".

Daru menyebutkan bahwa Clicking Monkeys adalah "orang yang dengan riang gembira mengklik telepon selulernya untuk mem-broadcast hoax ke sana-kemari, me-retweet, atau mem-posting ulang di media sosial.

Pengguna media sosial yang disebut *click-ing monkeys* ini punya kebiasaan hanya membaca judul berita tanpa membaca dan mendalami isi berita tersebut. Kalaupun ada sebagian dari kalangan tersebut yang membaca isi berita, namun mereka tak melakukan pengecekan silang untuk memastikan kebenaran sebuah informasi.

Biasanya, para pengguna medsos yang tergolong dalam *clicking monkey* dikarenakan terhasut oleh sebuah informasi palsu yang menyertakan data, sehingga terlihat seperti fakta.

Informasi menyesatkan yang mengkombinasikan info valid dan dicampur dengan info palsu sangat cepat dicerna dan kemudian dibagikan oleh para *clicking monkeys* ini. Sehingga, semakin lugu para *clicking monkeys*, maka semakin cepat pula informasi menyesatkan tersebar.

Pada awal 2022 lalu, Katadata Insight Center (KIC) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merilis survei yang menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian anggota masyarakat ikut menyebarkan informasi bohong atau hoaks.

Sebanyak 11,9 persen responden mengakui telah menyebarkan berita hoaks sepanjang tahun 2021. Persentase tersebut naik dari 11,2 persen dari tahun sebelumnya. Kendati demikian, responden yang mengaku tidak pernah menyebarkan berita atau informasi bohong jauh lebih banyak.⁵

Medsos dan ASN

Menurut Badan Kepegawain Negara (BKN), jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia pada Desember 2021 berjumlah sekitar 3,9 juta orang.⁶

Dari jumlah tersebut, sebagian besar ASN menggunakan medsos untuk kepentingan pribadi maupun untuk keperluan pekerjaan.

Jika diasumsikan sekitar 10 persen saja ASN yang menggunakan medsos secara aktif, maka akan ada sekitar 390 ribu ASN yang memanfaatkan platform komunikasi digital tersebut.

Jumlah yang cukup besar dan tentu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah agar para ASN mematuhi peraturan dan kode etik yang berlaku dalam menggunakan medsos.

Secara umum, dalam berkomunikasi diperlukan norma-norma atau aturan-aturan yang berfungsi sebagai pengendali atau kontrol sosial. Tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang tertib. Etika adalah satu bentuk untuk mewujudkan tertibnya masyarakat.

Dalam dunia internet dikenal istilah netiket, kependekan dari *network etiquette*, adalah kode perilaku yang baik dan sebaiknya ada di internet. Netiket pula yang harusnya menjadi rambu ketika ASN menggunakan media sosial.

Pada faktanya, masih didapati pemberitaan pelanggaran penggunaan medsos oleh ASN, misalnya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran netralitas pada Pilkada, atau kebocoran *draft* peraturan yang kemudian menimbulkan polemik di masyarakat.

³ Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintah https:/indonesiabaik.id/ebook/memaksimalkan-penggunaan-media-sosial-dalam-lembaga-pemerintah

⁴ The Clicking Monkey https:koran.tempo.co/read/opini/327490/the-clicking-monkeys?usefree=true

⁵ Survei Riset KIC: Masih Ada 11,9% Publik yang Menyebarkan Berita Bohong https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/20/survei-riset-kic-masih-ada-119-publik-yang-menyebarkan-berita-bohong

⁶ Statistik ASN Tahun 2021: Jumlah PNS Turun Sebesar 4,1% https://www.bkn.go.id/unggahan/2022/03/SIARAN-PERS-Nomor_-003_RILIS_BKN_III_2022-Jakarta-01-Maret-2022-Statistik-ASN-Tahun-2021_-Jumlah-PNS-Turun-Sebesar-41.pdf

Padahal, ASN terikat dengan kode etik dalam melaksanakan tugas dan kesehariannya. Kode etik ASN adalah pedoman untuk bersikap dan bertingkah laku dalam pelaksanaan tugas serta pergaulan hidup sehari-hari.

Seperti diketahui, menurut UU Nomor 5 tahun 2014, ASN memiliki tugas di antaranya melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Agar menjadi pelayan publik yang profesional, ASN harus menjalankan kode etik, bukan hanya pada pelayanan, tapi juga dalam berperilaku, termasuk dalam bermedia sosial.

Pemerintah telah mengeluarkan aturan sebagai pedoman etika penggunaan medsos bagi ASN melalui Surat Edaran Menpan-RB Nomor 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi melalui Medsos bagi ASN.⁷

Dengan menjunjung tinggi nilai dasar, kode etik, perilaku, serta pembinaan profesi, ASN dalam menyebarluaskan informasi di medsos diminta agar tetap memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah. Selain itu, ASN pun harus menjunjung nilai dasar ASN serta menjaga reputasi dan integritas.

Sebagai contoh pelanggaran yang melibatkan ASN di media sosial adalah kebocoran informasi kebijakan yang belum saatnya sampai ke masyarakat. Berkaitan dengan ini, ASN seharusnya dapat berhati-hati menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara.

Selain itu, dalam memberikan informasi terkait kedinasan harus benar, sehingga tidak menyesatkan pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. ASN dilarang menyalahgunakan informasi internal negara untuk kepentingan dirinya dan orang lain.

ASN pun harus mempergunakan medsos dengan bijak, tidak menyebarkan informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya, berita palsu (hoaks), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi.

Jangan pergunakan medsos untuk memproduksi dan menyebarluaskan informasi yang bisa menimbulkan kebencian dan perpecahan dalam masyarakat, asusila, perjudian, pencemaran nama baik, atau pengancaman.

Pedoman bermedsos bagi ASN sebenarnya sudah sangat jelas. Tetapi, masih banyak ASN yang melanggar. Bagi ASN yang melanggar kode etik, BKN dalam rilis Nomor 006/RILIS/BKN/V/ 2018, menyatakan, ada sanksi berupa hukuman ringan sampai dengan berat.

Sanksi akan diterapkan bagi ASN yang terbukti melanggar, termasuk di dalamnya ujaran kebencian yang disampaikan di medsos.

Sebagai ketegasan, sanksi bagi ASN yang melanggar bukan hanya secara administratif. Dalam UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, ada dampak hukum pidana bagi jenis pelanggaran tertentu.

Sanksi tersebut harus menjadi perhatian serius bagi ASN. Sebab, selain pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada instansi, masyarakat pun dapat melaporkan pelanggaran oleh ASN melalui situs www.lapor.go.id.

Selain dengan pengawasan internal dan pengontrolan yang dilakukan masyarakat, kini Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pun mengaktifkan polisi virtual di dunia maya.

Peran instansi memang diperlukan untuk memberikan edukasi dan etika menggunakan medsos bagi ASN. Tindakan preventif dan persuasif ini dilakukan untuk menjaga agar ASN tak terkena sanksi administratif apalagi terjerat sanksi pidana.

Jadi, lebih bijaklah dalam menyampaikan informasi, terutama dalam bermedia sosial. Karena, kelalaian dalam bermedsos selain bisa mencoreng nama lembaga/institusi negara di mata publik, juga merugikan bagi ASN secara pribadi.

Redaksi Majalah *Warta Pemeriksa* mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah.

Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id

dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee menulis sebesar Rp750.000.

⁷ Wajib Diketahui, Inilah Surat Edaran Menteri PANRB Bagi ASN Dalam Penggunaan Medsos https:setkab.go.id/wajib-diketahui-inilah-surat-edaran-menteri-panrb-bagi-asn-dalam-penggunaan-medsos/

PANDUAN ISOLASI MANDIRI



CEGAH PENULARAN COVID-19

SEGERA KE RUMAH SAKIT





Maksimal 10 hari sejak bergejala 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan

Gejala lebih dari 10 hari? Isolasi dilanjutkan hingga gejala hilang + 3 hari bebas gejala

LAKUKAN KOMUNIKASI **AKTIF TERKAIT KONDISI** KESEHATAN ANDA **KEPADA**







Dokter



Biro SDM







1-2 Pengajian dan doa bersama pegawai BPK Perwakilan DKI Jakarta dihadiri Ketua BPK Isma Yatun, 6 Juli 2022.



3Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Nyoman Adhi Suryadnyana menyerahkan LHP atas LK Polri Tahun 2021 kepada Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, di Jakarta, 28 Juni 2022.

4 Δ

Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Nyoman Adhi Suryadnyana dan Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Hendra Susanto menghadiri acara Pisah Sambut di Lingkungan AKN I, 22 Juli 2022.

5

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK Kementerian Investasi/BKPM tahun 2021 oleh Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II, Daniel Lumban Tobing, 14 Juli 2022.

6

Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II, Daniel Lumban Tobing menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK Badan Pusat Statistik tahun 2021, 18 Juli 2022.

















11

Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Pius Lustrilanang, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kemenkes tahun 2021 kepada Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, 13 Juli 2022.

12-13

Courtesy call Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Hendra Susanto dengan Holding Defence DI, 4 Juli 2022.

7

Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Sekretariat Negara, 12 Juli 2022.

8

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) BKN Tahun Anggaran 2021 oleh Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi kepada Plt. Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, di kantor BKN, 13 Juli 2022.

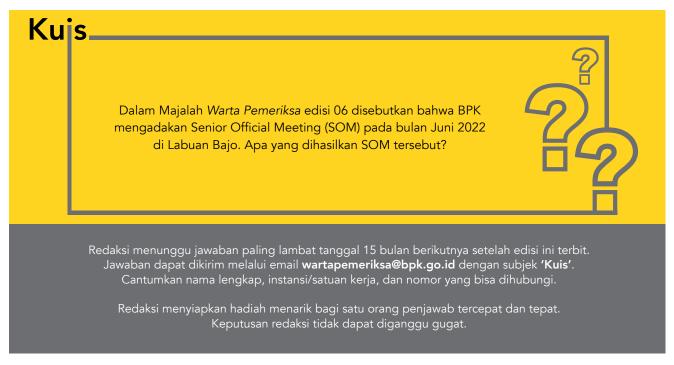
9-10

Anggota IV BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV, Haerul Saleh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian tahun 2021, di Jakarta, 13 Juli 2022. Turut dihadir Menteri PUPR, Mochamad Basoeki Hadimoeljono, serta Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.













SAI20 is initiated during the Indonesia G20 Presidency 2022 as an engagement group of G20. It is a forum for the Supreme Audit Institutions of G20 member countries to meet and discuss matters relevant to SAIs, and identify insights gained from their assurance activities. SAI20 is built in the spirit of INTOSAI-P12 on Value and Benefits of SAIs; making a difference to the lives of citizens.

PRIORITY ISSUES for 2022

Accelerating Economic Recovery

Supporting the Sustainable Development Goals (SDGs)

OBJECTIVES

Promote collaboration among 1 SAIs in G20 countries and other 2 stakeholders to contribute oversight, insight and foresight to foster accountable economic resilient governance.

Develop a platform for strengthening SAI's role as a partner of G20 member states in responding to global issues.

INCLUSIVENESS

SAI20 consistently explores opportunities for inclusiveness and collaboration to support resilient governance and achieve the 2030 agenda. SAI20 also intensively manage the dialogue and international cooperation to come up with best practices and recommendations to solve the problems presented by the current challenging global situation. To do so SAI20 is committed to echoing and voicing the initiatives of the INTOSAI Community.

SUSTAINABLE GOALS























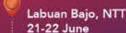




SAI20 Technical Meeting



SAI20 Seminar



SAI20 Senior Officials Meeting



SAI20 Summit



Draft RoP

 Insight from stakeholders on SAI20 priority issues



- Endorsed RoP for adoption
- Zero Draft of SAI20 Communique



 Adopted RoP Communique

